

**HALAMAN JUDUL**  
**“Implementasi Nilai Ajoareng-Joa’ Pada Pemilihan**  
**Legislatif Partai Golkar Daerah Pemilihan IV tahun 2014 di**  
**Kabupaten Bone**



**SKRIPSI**

**Oleh :**

**MAULANA SENTIKA**

**E 111 09 001**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU POLITIK DAN ILMU PEMERINTAHAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2016**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Implementasi Nilai Ajoareng-Joa' Pada Pemilihan Legislatif Partai  
Golkar Daerah Pemilihan IV Tahun 2014 di Kabupaten Bone**

**Nama Mahasiswa : MAULANA SENTIKA**

**Nomor Pokok : E 111 09 001**

**Jurusan : Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan**

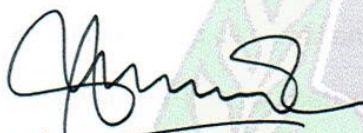
**Program Studi : Ilmu Politik**

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu  
Politik pada program studi Ilmu Politik, jurusan Politik Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin

**Makassar, Desember 2016**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si**  
**NIP: 196511091991031008**

**Pembimbing II**



**A. Ali Armunanto, S.Ip.M.Si**  
**NIP: 19801114 200812 1 003**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Politik Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. H. A. Syamsu Alam, M.Si**  
**NIP: 19641231 198903 1 027**

**Ketua Program Studi  
Ilmu Politik**



**A. Ali Armunanto, S.Ip. M.Si**  
**NIP: 19801114200812 1 003**



**LEMBAR PENERIMAAN**

**Skripsi:**

**Implementasi Nilai Ajoareng-Joa' Pada Pemilihan Legislatif Partai  
Golkar Daerah Pemilihan IV Tahun 2014 di Kabupaten Bone**

**Nama Mahasiswa : Maulana Sentika**

**Nomor Pokok : E 111 09 001**

Telah diperbaiki dan dinyatakan memenuhi syarat oleh panitia Ujian Skripsi  
Pada Program Studi Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

**Menyetujui**

**Tim Penguji :**

**Ketua :**

Prof.Dr.Armin Arsyad, M.Si

**Sekretaris :**

Endang Sari S.ip,M.Si

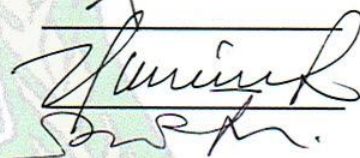
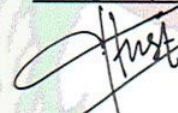
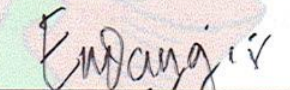
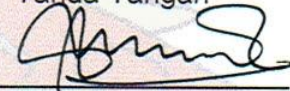
**Anggota :**

Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si.

A. Ali Armunanto, S.Ip, M.Si

A. Naharuddin, S.Ip, M.Si.

**Tanda Tangan**



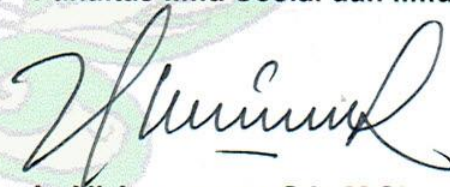
**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Politik Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Ketua Program Studi Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. H. A. Syamsu Alam, M.Si**  
NIP: 19641231 198903 1 027



**A. Ali Armunanto S.Ip.M.Si**  
NIP: 19801114200812 1 003

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah Rabbil A'lamín.* Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehairat Allah SWT. Karena atas rahmat dan hidayah-Nyalah penulis dapat merampungkan tugas akhir yang berupa skripsi ini. Skripsi ini berjudul “**Kajian Teknis Sosial Budaya dan Sosial Politik Pembentukan Kabupaten Bone Selatan Provinsi Sulawesi Selatan**”, dimana didalamnya terdapat hal-hal yang berkaitan erat dengan proses atau upaya pembentukan Bone Selatan sebagai salah satu kabupaten defenitif di Indonesia. Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis sadar dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan yang dikarenakan atas keterbatasan pengetahuan dan referensi ilmu yang dimiliki penulis, sebagaimana penulis merupakan makhluk biasa yang syarat akan keterbatasan. Olehnya itu, segala masukan yang sifatnya membangun senantiasa terbuka bagi siapa saja untuk mengiringi perbaikan kualitas tulisan ini dan penulis berterimakasih untuk itu.

Penulis sadar bahwa berbagai pihak telah memberikan arahan dan bantuan bagi penulis dalam merampungkan skripsi ini, untuk itu dengan

segenap kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggitingginya kepada :

1. Bapak *Prof. Dr. Armin Arsyad, M. Si* , selaku dosen pembimbing I dan Bapak *A. Ali Armunanto, S.IP., M.Si* selaku dosen pembimbing II atas segala kesiapan dan waktu luangnya, tenaga, perhatian, dan kesabarannya dalam memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Kepada *Prof. Dr. M. Kausar Bailusy, MA ,Dr. Gustiana A. Kambo, Dr Muhammad Saad M.Si, Drs. H. A. Yakub, M.Si, A. Naharuddin, S.IP, M.Si; ibu Ariana Yunus, S.IP. M.Si ,Ibu Sakinah Nadir S.IP, M.Si dan Kanda Endang Sari S.IP* , selaku dosen pengajar terima kasih atas pengetahuannya yang telah diberikan kepada penulis.
3. Seluruh Staf Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan dan para staf Akademik serta pegawai di lingkup FISIP Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis selama penulis menuntut ilmu di UNHAS dan terimakasih atas segala bentuk pelayanan yang diberikan kepada penulis selama ini.
4. Rasa persaudaraan dan solidaritas saya peruntukkan kepada teman-teman INTERAKSI 09, terimakasih atas segala rasa, waktu yang luang dan segala bentuk dukungan yang kalian berikan selama ini kepada penulis. Penulis berterimakasih atas arti persahabatan dan persaudaraan yang kalian berikan dan ciptakan diantara kita. Untuk My

*Brother* INTERAKSI WAN09 (bung Cibang, Ardi, Yuda, Tamsir, Kaswan, Adi, Rais, Aam, Kahar, Herul, Amed, Alif, Enal, Ray, Fikar, Lana, Rido, Sam, Acci, Asdar, Arlin, Asriadi, Roni, Teddi, Icam), untuk *My Sista* INTERAKSI WATI09 (Wiwi, Dian, Luli, Ayu, Icha, Faya, Ocie, Mucha, Debby). Kalian adalah sahabat dan saudara terbaik yang Tuhan berikan kepada saya semenjak melangkah pertama di Biru Kuning Sospol, semoga ikatan persahabatan dan persaudaraan kita tetap berlanjut sampai kapanpun.

5. Untuk teman-teman *KKN Gelombang 85* Terimakasih atas kebersamaan yang kalian berikan selama masa-masa KKN semua kenangan di posko Sidodadi, Kecamatan Wonomuyo, Kabupaten Polman masih sangat membekas potretnya dibenak penulis. Terimakasih pula atas pengetahuan-pengetahuan baru yang kalian berikan, penulis merasakan *betapa kita berbeda betapa kita terasa kaya*.
6. Untuk para informan antara lain Bapak *Andi Suaedi, SH; Dr. Andi Mappamadeng Dewang; H. Ajiep Padindang, SE, MM; A. Baso; Muchlis; Andi Ilham*. terimakasih atas segala waktu yang diluangkan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi dan data penting yang penulis butuhkan.

Penulis tak melupakan bantuan dan dukungan yang diberikan dari lingkup keluarga penulis, maka dari itu dengan penuh keramahan dan kerendahan hati izinkan penulis berterimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Hormatku padaayahanda *H.Alimin dan ibunda Hj.Nursiah*, terimakasih atas semua jasa-jasa yang diberikan kepada anakmu ini. Tak ada kata yang cukup mengimbangi rasa terimakasihku padamu yang telah menjadi orang tua yang hebat bagi penulis. Tetap sehat dan sabar menanti balasan anakmu ini.Amiin.!!!
2. Terimakasih kepada kanda *Kasmir, Subhan,Arma, kawan Zul, Kiki*, kawan *133 Family*, kawan *Starlight Team*selaku keluarga sekaligus sebagai sosok parner sejati saya selama menjani proses perkuliahan dari masa hitam putih sampai selesai, kalian luar biasa.
3. Terimakasih kepada sodari *Karina Hasan*, sosok wanita yang selalu hadir dalam suka duka dan memberi semangat dan motivasi dalam hidup penulis. Terimakasih atas bantuannya dalam membantu berbagai kesulitan yang dihadapi penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang, kebaikan dan ketulusanmu, semoga kelak kita kan selalu terjaga oleh-Nya.
4. Terimakasih kepada sodara “Orange’z”, “Sampoerna”, “Kopi Hitam” atas segala jasa-jasa maupun kesetiaanya menemani penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Diatas dari segala terimakasih dan kerendahan hati yang sempat terucapkan sebelumnya, saya sebagai penulis mempersembahkan karya tulis skripsi saya sebagai pemberian awal saya kepada Orangtua tercinta saya Ayahanda *H.Alimin dan Ibunda Hj.Nursiah*. Terimakasih atas segala bentuk

kasih sayang dan cinta kasih kepada penulis, penulis selalu berdoa agar kalian berdua sehat selalu dan melihat anakmu ini nantinya akan menjadi orang yang sukses, Amin. Kiranya skripsi ini menjadi awal persebahan pengabdian penulis kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta.

Penulis dengan harapan agar skripsi ini mendapat perhatian berkelanjutan dengan memberiarahan, saran bahkan kritikan yang bersifat membangun dalam perbaikan skripsi ini.

Makassar, 05 November 2014

IWAN.



## ABSTRAK

**MAULANA SENTIKA.E 111 09 001. Implementasi Nilai Ajjoareng-Joa' Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Bone ( Studi Kasus Pemilihan Legislatif Partai Golkar Daerah Pemilihan IV Kabupaten Bone) Dibawa bimbingan Prof.Dr.Armin Arsyad,M.Si sebagai pembimbing I dan A.Ali Armunanto,S.IP,M.Si sebagai pembimbing II.**

Pada orang bugis, hubungan yang terjadi antara seseorang yang disebut "*ajjoareng*" dengan "*joa*". *Ajjoareng* adalah seseorang yang menjadi panutan, bisa seorang punggawa, aru, karaeng maupun pemuka masyarakat lainnya. Sedangkan *joa* adalah para pengikutnya yang berasal dari golongan maradeka (orang merdeka) Untuk dapat mempertahankan kedudukan dan status politik maka seorang *ajjoareng* harus memperluas dan mengontrol jaringan *joa*'nya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran dan pengaruh implementasi nilai *ajjoareng-joa'* dalam perpolitikan di Kabupaten Bone khususnya pada pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Bone. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif dan dasar penelitian studi kasus untuk penganalisaan yang lebih mendalam terhadap peran pengaruh nilai *ajjoareng-joa* di Kabupaten Bone dengan jenis data berupa data primer dan sekunder. Teori dan grand teori yang digunakan adalah teori budaya politik dan grand teori paternalisme dan patrimonialisme dalam politik lokal yang digunakan dalam instrument penelitian adalah penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi nilai *Ajjoareng-joa'* dalam kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Bone memberikan gambaran tentang interaksi sosial masyarakat yang luhur dan mengakar pada hampir setiap diri individu dan kelompok masyarakat setempat. Interaksi sosial tersebut berimplikasi pula dalam proses terciptanya interaksi politik utamanya pada momentum pemilihan legislatif bulan april pada Tahun 2014. Konsep nilai *Ajjoareng-joa* merupakan alur untuk mengenali konstelasi politik setempat, mulai dari simpanan modal sosial seorang aktor/calon dan individu dalam masyarakat yang memiliki peran dan pengaruh signifikan terhadap proses politik lokal sampai pada gambaran menyeluruh tentang perilaku politik yang ada.

Kata Kunci : Ajjoareng – Joa", Partai Golongan Karya, maradeka, paternalisme, patrimonialisme.

## **ABSTRACT**

**MAULANA SENTIKA.E 111 09 001. Implementation of Value Ajjoareng-Joa 'In the legislative election of 2014 in Bone regency Brought guidance Prof.Dr.Armin Arsyad, M.Si as supervisor I and A.Ali Armunanto, S.IP, M.Si as supervisor II.**

In the Bugis, the relationship between a person called "ajjoareng" with "joa". Ajjoareng is someone who is a role model, can be a retainer, aru, Karaeng and other community leaders. While joa is the followers who come from the Maradeka (free man) To be able to maintain his position and political status then a ajjoareng must expand and control the network joa'nya.

This study aims to clarify the roles and influence the implementation of value-joa ajjoareng 'in politics in Bone regency, especially on the legislative elections Bone.penelitian Regency uses qualitative research methods and basic descriptive case study for deeper analysis of the role of the influence of value ajjoareng-joa in Bone regency with the type of data in the form of primary data and sekunder.Teori and used grand theory is the theory of the political culture and the grand theory of paternalism and patrimonialism in local political instrument used in the research is a field research with data collection through in-depth interviews.

The results showed that the implementation of value-joa Ajjoareng 'in social life Bone District provides an overview of the social interaction that is noble and rooted in almost every individual and local community groups. Social interaction has implications also in the process of the main political interaction in momentum april legislative elections in 2014. The concept of value-joa Ajjoareng a groove to recognize local political constellation, ranging from social capital deposits an actor / candidates and individuals in the community who have a role and significant influence on the local political process until a comprehensive overview of the existing political behavior.

Keywords: Ajjoareng - Joa ", the Golkar Party, Maradeka, paternalism, patrimonialism.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENERIMAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Budaya Politik .....	14
B. Paternalisme Dalam Politik Lokal.....	19
C. Patrimonialisme Dalam Politik Lokal .....	23
D. Konsep Ajoareng-Joa' Dalam Dinamika Politik Lokal.....	28
E. Kerangka Pikir.....	30
F. Skema Kerangka Pikir.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Tipe dan Desain Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian .....	34
C. Sumber Data .....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36

E. Teknik Analisis Data.....	37
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Sejarah Singkat Kabupaten Bone .....	39
B. Kondisi Politik Kabupaten Bone .....	46
C. Gambaran Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Bone .....	47
D. Gambaran Umum Objek Penelitian (Partai Golkar Kabupaten Bone) .....	50
<b>BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
A. Implementasi Nilai Ajoareng-Joa' Dalam Proses Pemilihan Legislatif Kabupaten Bone .....	58
B. Pengaruh Nilai Ajoareng-Joa' Dalam Proses Pemilihan Legislatif Kabupaten Bone .....	70
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
C. Kesimpulan .....	84
D. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kehidupan manusia di dalam masyarakat, memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan papan (rumah). Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, anggota suatu partai politik tertentu dan sebagainya <sup>1</sup>.

Manusia dalam masyarakat, memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara dan untuk melihat hal tersebut diperlukan suatu tinjauan yang mendalam terkait hubungan antara manusia dalam masyarakat serta penggambaran lingkungan sosial dan politik yang ada sebagai ruang lingkupnya. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan papan (rumah). Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan

---

<sup>1</sup> Imam Mujahidin Fahmid. 2012. *Identitas Dalam Kekuasaan*. Makassar: Innawa, hlm. 25

eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, termasuk kebutuhannya sebagai makhluk politik (*zoon politicon*) seperti anggota suatu partai politik tertentu dan korelasi dengan kehidupan politik yang mengikatnya.

Demokratisasi dalam sistem politik Indonesia menjadi kebutuhan yang benar dan sah berdasarkan perundang-undangan. Amanah UUD 1945 adalah merupakan bukti konkrit bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum dan dalam berpolitik. Artinya warga negara dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara politik tanpa ada tekanan dan pemaksaan dari pihak manapun.

Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik. Jika secara tidak langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi, dan jika secara langsung berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu.

Arena politik dalam sistem demokrasi memiliki orientasi untuk bergerak dalam rasionalitas kolektif dan bekerja melayani kebaikan bersama. Seperti diutarakan Colin Hay dalam *Why We Hate Politics*, ketika arena politik bekerja melayani rasionalitas kepentingan pragmatis personal elite-elite politik, rasionalitas kepentingan personal dalam arena



politik hanya akan menghasilkan irasionalitas kolektif. Saat para elite politik hanya melayani kepentingan personal maupun keluarganya dengan meminggirkan kesempatan bagi yang lain, maka politik tidak akan bekerja bagi kepentingan banyak orang. Politik hanya menjadi sarana bagi elite politik dan keluarganya untuk mengeksploitasi kekuasaan dan keuntungan material dalam membesarkan suatu partai tertentu <sup>2</sup>.

Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Oleh karena itu, seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap warga negara terhadap negaranya, pemerintahnya, pemimpin politik dan lain-lain.

Budaya politik, merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya

---

<sup>2</sup> Hay, Colin. 2007. *"Why We Hate Politics"*.

politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitenya. Seperti juga di Indonesia, Kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengan kelompok massa. Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu <sup>3</sup>. Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu. Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.

Perilaku politik, budaya politik dan demokrasi nampaknya akan terlihat pada proses politik berlangsung. Tahapan dalam pemilu dan pilkada bisa dijadikan sebagai ukuran untuk melihat seberapa besar tingkat kualitas ketiga konsep tersebut dilaksanakan secara ideal oleh warga negara dalam berpolitik. Menanggapi tentang perilaku politik masyarakat serta dinamika politik yang sedang berlangsung di Indonesia, khususnya dalam skala lokal, pengkajian tentang perilaku politik yang merupakan bagian terpenting sebenarnya juga dapat dilihat dalam kadar kekentalan budaya politik suatu masyarakat, sejauh mana budaya politik

---

<sup>3</sup> Anderson, Benedict R. O'G. 2000 Kuasa Kata : Jelajah Budaya – budaya Politik di Indonesia. Yogyakarta : Mata Bangsa.

itu memengaruhi perilaku seseorang, maka sejauh itu perilaku masyarakat mengikatnya. Dinamika politik nasional sampai lokal secara alami begitu kuat dipengaruhi oleh modal sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat termasuk nilai-nilai dan norma atau kaidah yang hadir di tengah-tengah masyarakat serta kemudian berlaku sebagai budaya politik yang tetap bereksistensi hingga sekarang <sup>4</sup>.

Pada orang bugis, hubungan yang terjadi antara seseorang yang disebut "*ajjoareng*" dengan "*joa*". *Ajjoareng* adalah seseorang yang menjadi panutan, bisa seorang punggawa, aru, karaeng maupun pemuka masyarakat lainnya. Sedangkan *joa* adalah para pengikutnya yang berasal dari golongan maradeka (orang merdeka) <sup>5</sup>. Sedangkan dalam masyarakat Makasar *ajjoareng* tersebut adalah para *karaeng* dan *anakaraeng*, dan *joa-joanya* disebut *ana'-ana'* atau *taunna* (orang-orangnya). Orang Sulawesi Selatan sendiri menyebut hubungan antara karaeng dengan *taunna* sebagai *Minawang* (mengikuti), yang maksudnya ikatan antar mereka sukarela sifatnya dan dapat diputuskan setiap saat <sup>6</sup>.

*Ajjoareng* dan *joa'* merupakan proses jalinan hubungan dengan sukarela maka untuk menghentikan hubungan yang selama ini dijalin bisa diakhiri kapan saja. Penghentian hubungan bisa saja dari pihak *ajjoareng* yang biasanya disebabkan karena *joa'* tidak dapat menunaikan kewajiban atas tuannya. Pihak *joa'* juga bisa mengakhiri hubungan antara lain

---

<sup>4</sup> Liddle, William R. *Pemilu-pemilu Orde Baru*. Terj. Nug Katjasungkana. Jakarta: Grafiti Press, 1992.

<sup>5</sup> Ibid, 2007: 12-13

<sup>6</sup> Kooreman, P.J. 1883. "De feitelijke toestand in het gouvernementsgebied van Celebes en Onderhoorigheden". *Indische Gids* 5

karena alasan bahwa *ajjoareng* tidak bisa lagi memberikan perlindungan seperti yang diharapkannya. Untuk itu *joa'* dapat saja berpaling dengan menjalin hubungan *ajjoareng* dengan lain. Bahkan, pemutusan hubungan bisa dilakukan *joa'* jika menilai bahwa sudah tidak lagi membutuhkan *ajjoareng* karena merasa sudah bisa melindungi dirinya sendiri dan mandiri secara ekonomi atau sosial. Maka yang sebelumnya berstatus *joa'* akan berubah dan mendeklarasikan diri sebagai *ajjoareng*.

Hal yang paling mendasar adalah berusaha untuk meredam terjadinya konflik yang akan berujung pada pemutusan hubungan. Tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan ini merupakan hubungan yang *simbiosis mutualisme* atau hubungan yang saling menguntungkan. Status sosial seorang *ajjoareng* akan meningkat jika *joa'*nya semakin bertambah. Status ini akan berdampak langsung pada para *joa'* sehingga mereka akan senantiasa saling menjaga. Seorang *ajjoareng* sangat membutuhkan *joa'* yang loyal dan jumlah semakin banyak. Maka seorang *ajjoareng* harus menjalankan fungsi sosialnya yaitu memberi rasa aman bagi *joa'*nya. Rasa aman yang dimaksud adalah menjaga kesejahteraan pengikutnya dan “menunjukkan pada mereka jalan menuju kebaikan” (*mitang ngi adecengeng*). Kebutuhan *ajjoareng* kepada *joa'* tidak hanya pada tataran fisik saja. Namun *joa'* juga membutuhkan kebutuhan spiritual berupa nasehat atau petunjuk akan kebaikan dari *ajjoarengnya*.

Dalam masyarakat Bugis terdapat dua jenis *joa'* (*pengikut*) Pertama, *joa'* yang berasal dari kelompok masyarakat yang berstatus sosial biasa (*ata*) dengan mengabdikan langsung kepada *ajjoareng*, misalnya menjadi pengawal atau pekerja di rumah dan tanah milik *ajjoareng*. Jenis yang kedua adalah *joa'* dari kelompok yang berstatus sosial tinggi atau bangsawan dengan status sebagai pendukung. *Joa'* jenis ini juga memiliki pengikut dan pendukung sendiri.

Untuk dapat mempertahankan kedudukan dan status politik maka seorang *ajjoareng* harus memperluas dan mengontrol jaringan *joa'*nya. Metode yang biasa digunakan *ajjoareng* untuk membangun jaringan *joa'*nya antara lain adalah dengan menunjukkan kedermawanan dan membangkitkan rasa hormat dari kalangan pengikut dengan melindungi serta menjaga kesejahteraan mereka lebih baik dibanding yang lain. Metode lain adalah dengan membangkitkan kebanggaan pengikut dan harapan akan masa depan yang lebih baik dengan menduduki jabatan tinggi atau tampak sebagai orang yang paling berpeluang untuk menduduki jabatan tersebut. Hal ini akan berdampak pada rasa kebanggaan *joa'* serta berharap memperoleh keuntungan dari jabatan *ajjoareng*nya. Metode selanjutnya adalah “perkawinan politik” dengan menikahi keturunan atau keluarga bangsawan yang memiliki *ajjoareng* yang banyak serta pendukung yang berpengaruh atau kharismatik.

Garis keturunan bukanlah jaminan seseorang dalam masyarakat Bugis untuk mendapatkan posisi jabatan politik. Aturan yang ada

membuka peluang bagi siapa saja yang memiliki status sosial tertentu. Jumlah kandidat yang memenuhi syarat ini akan cukup banyak sehingga memungkinkan terjadinya kompetisi dalam suksesi ini. Kandidat yang menjadi akan terpilih sebagai pemimpin selanjutnya adalah kandidat yang memiliki pengikut paling banyak serta memiliki pendukung yang cukup berpengaruh.

Konsep ini merupakan sebuah nilai demokrasi dalam masyarakat Bugis. Pemimpin dipilih berdasarkan suara mayoritas dengan indikator jumlah *joa'* baik dari kalangan biasa maupun dari kalangan bangsawan yang memiliki *joa'* sendiri yang dianggap sebagai 'orang terpandang' (*to riakkitangi*) atau 'orang yang dihargai' (*to riasiriqi*).

Iklim politik di Kabupaten Bone yang terus mengalami dinamika dalam beberapa tahun semenjak era reformasi serta penerapan sistem demokrasi melalui regulasi pemilihan kepala pemerintahan dan legislatif secara langsung oleh warga Negara yang terdaftar sebagai pemilih memberikan indikasi bahwa ada hal-hal tertentu yang menjadi pemantik dinamisasi tersebut, dan budaya politik menjadi refleksi yang memungkinkan menjelaskan hal itu. Seperti halnya periode pergantian kepemimpinan, potret mengenai suksesi pemilihan dan pola distribusi/alokasi kepentingan merupakan gambaran nyata peraturan politik lokal. Pemilu pasca Orde Baru merupakan perluasan kekuatan tiga partai politik besar yang menemukan jalan baru melalui demokrasi untuk memperkuat posisi partai dalam negara. Tetapi disisi lain



demokrasi yang diperjuangkan pasca Orde Baru membawa Pada semakin kuatnya konflik internal partai masa reformasi ini terlihat pada partai yang berkuasa pada masa Orde Baru yaitu; Partai Golkar.

Partai Golkar merupakan partai besar yang relatif mendominasi dalam Pemilu di Kabupaten Bone. Terbukti elit-elit dari partai ini selalu mengisi alokasi kursi anggota legislatif yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum pada Pemilu Legislatif Tahun 2004, 2009 dan Tahun 2014.

Partai Golkar adalah salah satu partai politik yang eksistensinya telah berakar di Kabupaten Bone dengan perangkat organisasi yang telah lama terbentuk dan berkesinambungan hingga struktur pimpinan desa dan kelurahan bahkan kelompok-kelompok kader (Pokkar) yang masih eksis dalam setiap dusun dan lingkungan. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir diketahui bersama bahwa setelah reformasi sistem politik dan pemerintahan Indonesia dari aras pusat sampai lokal memberi warna yang berbeda dibandingkan periode sebelum era reformasi. Beragam hal baru dalam proses politik lokal hingga saat ini muncul mulai dari kegiatan politis para elit dan masyarakat sampai pada perilaku politik masing-masingnya pada momentum pesta politik yang sudah beberapa kali terjadi semenjak era reformasi beserta alur penerapannya, sehingga sangat penting untuk lebih mendalami pola dan bentuk yang ada dalam hubungan setiap masyarakat setempat guna memungkinkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar dinamika politik tersebut

khususnya perihal pemberian dukungan dan pilihan politik pada konteks pemilihan anggota legislatif (DPRD Tingkat II) di Kabupaten Bone. Partai Golkar adalah salah satu partai penguasa di Kabupaten Bone dengan jumlah kader yang menduduki DPRD Kabupaten Bone sebanyak Tahun 2014.

Keberadaan konsep budaya "*Ajjoareng-Joa*" Partai Golkar setidaknya jika ditelisik lebih dalam, akan sangat memungkinkan menjelaskan tentang stratifikasi politik utamanya pada strata kaum pemilih yang merupakan pemilik sumber politik kolektif yang penting. Tanpa disadari relasi antara *ajjoareng* (panutan) dan *joa'* (pengikut) ini telah mendarah daging dan bertransformasi dalam berbagai macam bentuk dengan berbagi variasi jenis eksploitasi dan penekanan terhadap pihak *joa'* yang tentu selalu menjadi pihak yang tidak punya banyak pilihan. Pihak *ajjoareng* yang semakin merajarela, ia terus menambah kapital, dengan modal dan jaringan yang ia miliki, kerja keras para *joa'* ia nikmati dengan peningkatan kekayaan secara eksponensial. Sedangkan, para *joa'* (pengikut) ini semakin terjebak (atau bahkan nyaman) dalam keadaan relasi yang membuat ia tidak bisa meningkatkan kesejahteraannya secara signifikan.

Seperti halnya yang terjadi di daerah pemilihan IV DPRD Kab.Bone, suara mayoritas akan ditentukan oleh para bangsawan yang memiliki pengikut (*joa'*) paling banyak. Contoh yang bisa penulis lihat adalah anggota DPRD Kab.Bone dari fraksi partai Golkar (golongan

karya) di daerah pemilihan IV mereka para tokoh yang sangat dihormati yang setiap momen politik khususnya pada pemilihan legislatif di Kab.Bone,selalu mendapatkan dukungan yang sangat signifikan melampaui pencapaian dari partai lain.adapun faktor faktor yang mempengaruhi keterpilihan tokoh tersebut adalah kemampuan mereka menjaga kedekatan secara emosional dengan para pengikut dan kharismatik sebagai pemimpin tidak pernah berkurang. , berdasarkan pengamatan sementara penulis, pola *Ajjoareng-joa'* belum cukup menjelaskan secara keseluruhan tentang budaya politik yang ada dalam mempengaruhi kehidupan politik setempat. Perlu untuk mengidentifikasi peran nilai utama lainnya yang juga terkait dengan hal tersebut.

Hal inilah yang membuat Penulis tertarik untuk meneliti ***“Implementasi Nilai Ajjoareng-Joa’ Pada Pemilihan Legislatif Partai Golkar Tahun 2014 Daerah Pemilihan IV di Kabupaten Bone.***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di jelaskan sebelumnya maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana Implementasi nilai *ajjoareng-joa'* partai Golongan Karya (Golkar) dalam pemilihan legislatif DPRD di Kabupaten Bone daerah pemilihan IV (Dapil IV) Tahun 2014?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan peran dan pengaruh implementasi nilai *ajjoareng-joa'* dalam perpolitikan di Kabupaten Bone khususnya pada pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Bone.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi positif terhadap pengembangan studi politik lokal, khususnya pada kalangan elit politik lokal di Kabupaten Bone.

##### **1. Manfaat Akademik**

- a. Penelitian ini tidak bersifat jangka pendek melainkan sebagai penelitian jangka panjang untuk melihat kondisi politik yang ada di tengah masyarakat
- b. Sebagai kontribusi pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan menyangkut budaya politik partai Golkar pada pemilihan legislative DPRD Kabupaten Bone .
- c. Sebagai bahan studi atau tambahan literatur bagi mahasiswa/fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta sebagai bahan referensi dan informasi bagi masyarakat dan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya bagi peneliti sendiri untuk memahami secara mendalam akan

Implementasi nilai *ajjoareng-joa'* partai Golongan Karya (Golkar) dalam pemilihan legislatif DPRD di Kabupaten Bone daerah pemilihan IV (Dapil IV) Tahun 2014.

- b. Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan dan perbandingan dalam memahami peta politik lokal di Kabupaten Bone.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka sangat penting untuk lebih memperjelas dan mempertegas penelitian dari aspek teoritis. Literatur-literatur yang berisi pendapat para ahli maupun website banyak digunakan untuk penyempurnaan penelitian ini. Pada tinjauan pustaka ini akan dijelaskan beberapa pengertian yang disertai pendapat para ahli yang memiliki kaitan dengan pokok bahasan serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini yang meliputi Budaya politik lokal (nilai-nilai politik lokal) yang di dalamnya membahas tentang paternalisme dalam politik, patrimonialisme dalam politik serta konsep *ajjoareng Joa'* dalam dinamika politik lokal pada partai Golkar.

#### **A. Budaya Politik**

Budaya merupakan konsep yang sulit untuk dirumuskan karena ia tidak berwujud, implisit dan dianggap sudah semestinya ada atau menjadi sesuatu yang baku. Budaya organisasi merupakan seperangkat nilai, norma, persepsi dan pola perilaku yang dibuat atau dikembangkan dalam suatu organisasi dengan maksud untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul, apakah masalah yang terkait dengan adaptasi secara eksternal atau masalah integrasi secara internal. Pada tingkat organisasi, budaya merupakan serangkaian asumsi-



asumsi keyakinan (belief), nilai-nilai dan persepsi dari para anggota kelompok organisasi yang mempengaruhi dan membentuk sikap dan perilaku kelompok yang bersangkutan <sup>7</sup>.

Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitnya. Seperti juga di Indonesia, Kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengan kelompok massa <sup>8</sup>.

Konsep budaya politik muncul dan mewarnai wacana ilmu politik pada akhir Perang Dunia II, sebagai dampak perkembangan ilmu politik di Amerika Serikat. Sebagaimana diungkapkan oleh banyak kalangan ilmuwan politik, setelah PD II selesai, di Amerika Serikat terjadi apa yang disebut revolusi dalam ilmu politik, yang dikenal sebagai *Behavioral Revolution*, atau ada juga yang menamakannya dengan *Behaviorali*.<sup>9</sup>

udaya politik Indonesia hingga dewasa ini belum banyak mengalami perubahan/pergeseran dan perpindahan yang berarti. Walaupun sistem politiknya sudah beberapa kali mengalami perubahan ditinjau dari pelembagaan formal. Misalnya, sistem politik demokrasi liberal ke sistem politik demokrasi terpimpin dan ke sistem politik demokrasi Pancasila. Budaya politik yang berlaku dalam

---

<sup>7</sup> Hood, R. and Koeborg, C.S. 1991. Organizational Culture Relationship with Creativity and Other Job Related Variables. *Journal of Business Research*. 15 (3):397-406.

<sup>8</sup> Anderson, Benedict R. O'G. 2000 Kuasa Kata : Jelajah Budaya – budaya Politik di Indonesia. Yogyakarta : Mata Bangsa.

<sup>9</sup>Afan Gaffar, *Politik Indonesia, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 1999, hlm. 97

sistem perpolitikan Indonesia relatif konstan. Hal ini dikarenakan upaya ke arah stabilitas politik tidak perlu tergesa-gesa agar diperoleh keseimbangan dan mengurangi konflik seminimal mungkin.<sup>10</sup>

Behavioral revolution terjadi dalam ilmu politik adalah sebagai dampak dari semakin menguatnya tradisi atau madzhab *positivisme*, sebuah paham yang percaya bahwa ilmu sosial mampu memberikan penjelasan akan gejala sosial seperti halnya ilmu-ilmu alam memberikan penjelasan terhadap gejala-gejala alam, dalam ilmu sosial, termasuk ilmu politik. Paham ini sangat kuat diyakini oleh tokoh-tokoh besar sosiologi, seperti *Herbert Spencer*, *Auguste Comte*, juga *Emile Durkheim*.

Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu. Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.

---

<sup>10</sup> Dr.H.Rusadi Kantaprawira, SH., Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar, Cetakan Kelima (Cetakan Pertama 1977), CV. Sinar Baru, Bandung, 1988.

Berikut ini adalah beberapa pengertian budaya politik yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk lebih memahami secara teoritis sebagai berikut :

- a. Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.
- b. Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Yang pertama menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. Yang kedua (aspek generik) menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka, atau tertutup.
- c. Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan.
- d. Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat. Pola kepemimpinan (konformitas atau mendorong inisiatif kebebasan), sikap terhadap mobilitas (mempertahankan status quo atau mendorong mobilitas), prioritas kebijakan (menekankan ekonomi atau politik).

Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas (dalam arti umum atau menurut para ahli), maka dapat ditarik beberapa batasan konseptual tentang budaya politik sebagai berikut :<sup>11</sup>

*Pertama:* Konsep budaya politik lebih mengedepankan aspek-aspek non-perilaku aktual berupa tindakan, tetapi lebih menekankan pada berbagai perilaku non-aktual seperti orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan. Hal inilah yang menyebabkan Gabriel A. Almond memandang bahwa budaya politik adalah dimensi psikologis dari sebuah sistem politik yang juga memiliki peranan penting berjalannya sebuah sistem politik.

*Kedua:* Hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik, artinya setiap berbicara budaya politik maka tidak akan lepas dari pembicaraan sistem politik. Hal-hal yang diorientasikan dalam sistem politik, yaitu setiap komponen-komponen yang terdiri dari komponen-komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik. Seseorang akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap sistem politik, dengan melihat fokus yang diorientasikan, apakah dalam tataran struktur politik, fungsi-fungsi dari struktur politik, dan gabungan dari keduanya.

---

<sup>11</sup> Almond, Gabriel dan G Bingham Powell Jr. 1966. *Comparative Politics: A Development Approach*. Boston: Little Brown.

Misal orientasi politik terhadap lembaga politik terhadap lembaga legislatif, eksekutif dan sebagainya.

*Ketiga:* Budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif (dalam jumlah besar), atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan per-individu. Hal ini berkaitan dengan pemahaman, bahwa budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara secara massal yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik yang ideal.

## **B. Paternalisme Dalam Politik Lokal**

Budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap perilaku, cara kerja dan motivasi para manajer dan bawahannya untuk mencapai kinerja organisasi.<sup>12</sup> Dengan demikian budaya mempunyai pengaruh terhadap partisipasi penyusunan anggaran dalam peningkatan kinerja manajerial. Penelitian yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa perilaku dan budaya manajer berpengaruh terhadap kinerja.<sup>13</sup>

Dilihat dari asal katanya, paternalis artinya memiliki kesan kebapakan, sedangkan paternalisme adalah sistem kepemimpinan yang menunjukkan hubungan kerja antara atasan dan bawahan

---

<sup>12</sup> Holmend dan Marsden (1996) dalam Poerwati, Tjahjaning, (2002). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial: Budaya Organisasi Dan Motivasi Sebagai Variabel Moderating, Simposium Nasional Akuntansi 5 Semarang.

<sup>13</sup>Frucot, dan Shearon Winston T. (1991). .Budgetary Participation Locus of Control and Mexican Managerial Performance and Job Satisfaction.. *The AccountingReview*, January: 80 . 89.

dilaksanakan seperti hubungan antara bapak dan anak. Maka, kepemimpinan paternalistik adalah pemimpin yang perannya diwarnai oleh sikap kebapak-bapakan dalam arti bersifat melindungi, mengayomi dan menolong anggota organisasi yang dipimpinnya.<sup>10</sup>

Budaya paternalistik adalah budaya di mana atasan berperan sebagai Bapak yang lebih tahu akan segala hal, sehingga bawahan merasa tidak enak jika menyampaikan usulan apalagi mengkritik kesalahan atasan. Manajemen yang menerapkan budaya seperti ini akan mengurangi inisiatif bawahan atau dengan kata lain akan menghambat adanya partisipasi. Secara umum diketahui bahwa para manajerial level menengah dan bawahan di Indonesia banyak yang masih merasa sungkan untuk mengungkapkan apa yang menjadi pikiran, gagasan dan ide-ide mereka kepada atasannya meskipun para manajerial tersebut tahu bahwa hal itu lebih baik dari pada sekedar menuruti perintah atasan.<sup>15</sup>

Suatu keputusan atau kebijakan paternalistic pada intinya membatasi kebebasan seseorang atau sekelompok orang untuk tujuan melindungi dan mempromosikan kebaikan mereka sendiri. Definisi ini menunjuk kepada tiga unsur paternalisme, masing-masing mungkin masih problematis; lokus batasan, bentuk, dan tujuannya. Lokus paternalisme

---

<sup>14</sup> <http://abdulwakit.blogspot.com/2011/03/gaya-kepemimpinan.html>

<sup>15</sup> Gultom (1994) dalam Mustika, Reni. 1999. Pengaruh Locus of Control dan Budaya Paternalistik terhadap keefektifan penganggaran dalam peningkatan kinerja manajerial. Jurnal bisnis dan akuntansi, Vol 1 No.2 hal 93-115.

merujuk kepada hubungan antara mereka yang kebebasannya dibatasi dan mereka yang menetapkan batasan itu. Bahkan terhadap hubungan paternalistic yang paling aslipun, antara orang tua dan anak, politik pun campur tangan. Kekuasaan politik dan kekuasaan parental tidak dapat dipisahkan begitu tajam seperti yang diandaikan lucked an banyak kaum liberal lainnya. Mereka mengandaikan bahwa kita dapat membedakan kelas orang-orang, yang ditentukan hanya oleh usia kronologis, yang kebebasannya bisa dibatasi secara sah demi kebaikan mereka sendiri.<sup>16</sup>

Paternalisme merujuk kepada hubungan antara dua orang dewasa, ini penting membedakan antara hubungan dimana kaum paternalis dan orang-orang yang mereka bantu adalah lebih kurang sama dalam status, dan hubungan dimana kaum paternalis, berdasarkan peran social atau posisi kelembagaan, memiliki status yang lebih tinggi. Apa yang menentukan pembatasan kebebasan pada jenis hubungan kedua (antara seorang professional dan kliennya), seperti kita lihat, bisa berbeda dari apa yang dianggap sebagai suatu pembatasan dalam jenis hubungan pertama. Ketidaksamaan intervensi paternalistic yang pada mulanya cukup independen, bisa mempengaruhi karakternya, dan mungkin pada gilirannya menimbulkan ketidaksamaan. Bahkan jika terisolasi atau sporadic, intervensi itu sendiri dapat melahirkan dampak paternalistik yang bertahan sepanjang waktu dan menyebar dalam lingkup social,

---

<sup>16</sup>Arny Gutmann, “ *children, paternalism and education*” dalam philosophy and publik Affars. 9 (musim panas 1980), Hlm. 338-358 dan francis schrag. “ The child in the Moral order “ dalam philosophy, 2 (april 1977), hlm. 167-177

berkembang melebihi pertemuan dua individu. Paternalisme dalam konteks ini ditafsirkan salah jika digambarkan hanya sebagai satu hubungan antar individu.

Walaupun setuju bahwa paternalisme mencakup suatu pemahaman tentang yang baik pada seseorang yang tidak ingin dirawat, namun dia keberatan bahwa paternalisme tidak harus selalu dianggap sebagai pembatasan kebebasan. Untuk mengatakan bahwa anda menetapkan sesuatu pada seseorang secara normal mengimplikasikan bahwa anda membatasi tindakannya dalam suatu hal dan karenanya dia kurang bebas melakukan apa yang ingin dilakukannya.<sup>17</sup>

Konsep tentang paternalisme harus mengakui bahwa pembatasan atas kebebasan mungkin saja mengambil bentuk tidak hanya pemaksaan fisik atau hukum, melainkan juga rintangan yang lebih halus dan canggih yang muncul dari kekuasaan yang tidak setara dalam Beberapa jenis relasi. Dalam contoh ini kaum para paternalis mengemukakan satu pemahaman tentang yang baik dengan membatasi, lewat suatu cara-cara bertindak yang ingin dilaksanakan seseorang, kebebasan seorang pasien bisa dibatasi bila dokter enggan memberikan informasi yang mungkin akan mencondongkan pasien memilih jalur tindakan yang berbeda. Sama halnya, pilihan warga negara itu dibatasi bila pemerintah menolak

---

<sup>17</sup>Dworkin, Gerald. "Paternalism", *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. <http://plato.stanford.edu/entries/paternalism/>. First published Wed Nov 6, 2002; substantive revision Tue Jun 1, 2010.



mengungkapkan informasi penting. Namun penting juga mencegah penafsiran konsep tentang kebebasan sebegitu luas sehingga masalah paternalisme melebur. Konsep tentang kebebasan yang begitu positif.

### **C. Patrimonialisme Dalam Politik Lokal**

Sistem patrimonialisme merupakan sentralisasi kekuasaan yang berpusat pada satu orang penguasa yang mengakumulasi kekuasaannya sedangkan yang lain hanya mengidentifikasi kepentingannya. Seorang raja membagikan kekuasaannya kepada pihak yang dapat dipercaya dan mampu memberikan pengaruh besar di masyarakat untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan kekuasaannya sehingga sistem ini memberikan keuntungan yang dipertahankan oleh kedua pihak.<sup>18</sup>

Negara Indonesia menampilkan dua wajah yang kontradiktif. Di satu sisi negara mempunyai formasi yang besar dan hirarkhi yang ketat, mulai dari istana negara sampai ke pelosok desa. Negara mempunyai struktur birokrasi yang gemuk dan pegawai yang mengontrol dan melayani segenap sektor kehidupan rakyat, mulai dari mengurus agama, masuk ke perut perempuan sampai membagi-bagi uang kepada fakir miskin. Tetapi negara Indonesia belum bersifat modern, canggih dan impersonal sebagaimana dituturkan oleh Max Weber. Negara, apalagi di aras lokal, menampilkan wajah negara semu (*pseudo state*), yang dikuasi secara

---

<sup>18</sup>Jati, W. Raharjo. 2012. Kultur Birokrasi Patrimonialisme. *Jurnal Borneo Administrator*. Volume 8 No. 2. [www.academia.edu/1887608/Kultur\\_Birokrasi\\_Patrimonialisme\\_dalam\\_Pemerintah\\_Provinsi\\_Daerah\\_Yogyakarta](http://www.academia.edu/1887608/Kultur_Birokrasi_Patrimonialisme_dalam_Pemerintah_Provinsi_Daerah_Yogyakarta) (diakses tanggal 25 Desember, 2013)

tradisional-personal oleh orang-orang atau keluarga/dinasti kuat, atau sering disebut dengan negara patrimonial yang diwariskan dari kerajaan masa lalu<sup>19</sup>

Patrimonialisme sesungguhnya merupakan bentuk kepemimpinan authoritarian, diktator, di mana negara dijalankan sesuai kehendak pribadi pemimpin negara (*personal rule*). Pemimpin negara memposisikan diri diatas hukum dan hanya mendistribusikan kekuasaan kepada kerabat dan kroni dekatnya. Seringkali menggunakan kekerasan guna mempertahankan posisi kepemimpinannya. Pemerintahan patrimonial bersandarkan diri pada tiga unsur yang membuatnya jadi pemerintahan tradisional dan belum mencapai tahap birokratis dan modern. Unsur pertama adalah klientisme. Istilah ini merujuk pada hubungan kekuasaan yang dibangun oleh penguasa dan lingkungan sekitarnya. Dalam birokrasi modern, pusat loyalitas ada pada impersonal order (hukum). Namun, dalam klientisme, loyalitas ada pada pribadi penguasa. Dalam birokrasi modern, ada pembagian wewenang yang dihormati, seperti yang digariskan dalam trias politika (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Tapi, dalam klientisme, penguasa menerabas batas itu sesukanya, mencampuri atau mengintervensi wewenang legislatif ataupun yudikatif.

---

<sup>19</sup>Eko Nugroho. 2008. *Sistem Informasi Manajemen: Konsep, Aplikasi, dan Perkembangan*. Andi. Yogyakarta.

Dalam negara yang patrimonalistik penyelenggaraan pemerintah berada di bawah kontrol langsung pimpinan negara.<sup>20</sup> Adapun menurut Affan Gaffar, negara patrimonalistik memiliki sejumlah karakteristik sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a. Penguasa politik seringkali mengaburkan antara kepentingan umum dan kepentingan publik.
- b. *Rule of law* lebih bersifat sekunder apabila dibandingkan dengan kekuasaan penguasa.
- c. Kebijakan seringkali bersifat partikularistik daripada bersifat universalistik.
- d. Kecenderungan untuk mempertukarkan sumber daya yang dimiliki seorang penguasa kepada teman-temannya lebih besar.

Birokrasi patrimonial serupa dengan lembaga perkawulaan, di mana patron adalah gusti atau juragan, dan klien adalah kawula, hubungan keduanya bersifat ikatan pribadi, dianggap mengikat seluruh hidup, seumur hidup, dengan loyalitas primordial sebagai dasar pertalian hubungan. Warisan birokrasi patrimonial modern dan masa feodalismenya di Indonesia telah menimbulkan birokrasi nepotisme, yang memberi jabatan atau jasa khusus kepada sanak dan sahabat. Dalam lingkungan

---

<sup>20</sup>Max Weber. 1985. *Konsep-konsep dasar dalam sosiologi*. Jakarta. CV Rajawali.

<sup>21</sup> Ahmad Fhatoni. 2015. *Budaya Politik di Indonesia : Perkembangan & Ciri-ciri*. <http://www.zonasiswa.com/2014/11/budaya-politik-di-indonesia.html>

yang seperti itu, korupsi dianggap sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja dan masyarakat pun tidak marah jika mengetahui berbagai tindakan korup yang telah terjadi.

Ada empat alasan utama mengapa politik kekerabatan lebih disukai elite-elite politik di suatu negara. Pertama, kepercayaan (trusty) ini lebih disebabkan karena kerabat lebih dipercaya dan tak mungkin berkhianat seperti lazim dilakukan politikus pemburu kekuasaan. Kedua, loyalitas (loyalty) kerabat akan jauh memiliki loyalitas tinggi dalam konteks menjalankan semua tugas politik terutama dalam hal menjaga wibawa dan kehormatan kerabat besar ketimbang orang lain. Ketiga, solidaritas (solidarity) kerabat dipastikan jauh memiliki tingkat solidaritas yang tangguh dalam memiliki terutama dalam menolong klan keluarga besar dari kebangkrutan kekuasaan dan kekayaan ketimbang mereka yang bukan dari kalangan kerabat. Keempat, proteksi (protection) ini terkait dengan model mempertahankan gengsi dan kehormatan keluarga besar. Mereka yang berasal dari klan yang sama akan cenderung mampu menjaga apa yang telah dimiliki keluarga ketimbang orang lain.<sup>22</sup>Peneliti sosial dari University of Sussex, Inggris, politik model regenerasi ini akan melahirkan politik kekerabatan yang dibangun di atas basis pemikiran doktrin politik kuno: darah lebih kental daripada air (*blood*

---

<sup>22</sup> Eisenstadt, S.N. dan L. Roniger. 1984. *Patrons, Clients, and Friends: Interpersonal Relations and the Structure of Trust in Society*. Cambridge: Cambridge University.

*is thicker than water*). Doktrin ini menegaskan, kekuasaan karena dapat mendatangkan kehormatan, kemuliaan, kekayaan, dan aneka social privileges harus tetap berputar di antara anggota keluarga dan para kerabat saja.<sup>22</sup>

Mewariskan jabatan atau kekuasaan politik secara procedural melalui pelaksanaan pilkada, apakah itu kursi gubernur, bupati atau walikota kepada istri, anak, menantu, atau saudara yang hanya berputar di kalangan kerabat penguasa (*incumbent*) tidaklah melanggar hukum, karena tidak diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 juncto UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang pilkada. Namun praktik ini jelas melanggar falsafah politik (etika, kepatutan, dan norma umum). Karena model ini jelas akan menyumbat regenerasi calon pemimpin politik lokal berdasar pada kompetisi yang fair yang seharusnya bertumpu pada rekam jejak keilmuan, kemampuan dan integritas moral. Jangan sampai pilkada hanya menjadi ritual demokrasi prosedural untuk melestarikan aristokrasi yang melahirkan raja-raja kecil di 'kerajaan' daerah.

Pilkada di Indonesia saat ini kian penuh ironisme. Di satu sisi, rakyat kian apatis dan tidak peduli sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada cenderung menurun. Apatisme masyarakat ini justru

---

<sup>22</sup> Amich Alhumami. "Politik Kekerabatan", dari [www.kompas.co.id](http://www.kompas.co.id) "Hoakiau Berpolitik: Dari Trauma ke Trauma" dari [www.majalahtempointeraktif.com](http://www.majalahtempointeraktif.com)

dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk meraih jabatan dan kekayaan. Mereka adalah orang-orang yang ingin melanggengkan kekayaan dan kekuasaan agar tetap jatuh kepada garis keluarganya.

#### **D. KONSEP *AJJOARENG JOA'* DALAM DINAMIKA POLITIK LOKAL**

Kalangan orang Bugis masih memegang pandangan mereka terhadap konsep *Ajjoareng* dan *Joa*. *Ajjoareng* menurut mereka adalah orang yang menjadi ikutan atau panutan bagi masyarakat. Biasanya orang-orang yang berada dalam posisi ini adalah Punggawa, Aru, atau pemuka masyarakat lainnya. Para orang-orang tersebut merupakan tokoh pemimpin yang menjadi sumbu kegiatan orang-orang disekitarnya, yang mengikuti kemauan serta kehendaknya dengan patuh. Pengikut-pengikut ini mereka sebut *Joa*, dan mereka berasal dari golongan Maradeka (orang yang merdeka) yang setia. Seseorang yang merasa dirinya *Joa* dari seorang *Ajjoareng* akan selalu berusaha menunjukkan kesetiannya tersebut dalam keadaan apapun dan dalam situasi apapun dan kapan juga *Ajjoareng* memerlukannya. Walaupun kesetiaan tersebut juga memiliki syarat, yaitu mereka akan tetap setia selama *Ajjoareng* nya tetap bersungguh-sungguh atau betul betul menjaga dan menghargai siri mereka. Mereka dengan sukarela menjadi pengikut atau mereka ini merupakan keturunan-keturunan dari para pengikut sebelumnya. Orang Sulawesi Selatan

sendiri menyebut hubungan antara Karaeng atau Anakaraeng (*Ajjoareng*) dan *Joa* tersebut sebagai Minawang (mengikuti), yang maksudnya ikatan anantara mereka sukarela sifatnya dan dapat diputuskan setiap saat.<sup>23</sup>

Telah dibahas sebelumnya bahwa dalam masyarakat Bugis Makassar, *Ajjoareng* biasanya diduduki oleh kalangan bangsawan atau Pappuangeng. Sedang *Joa* berasal dari kalangan masyarakat biasa yang disebut ana'guru (pengikut). Hubungan *Ajjoareng* dan *Joa* merupakan hubungan kewajiban timbal-balik. Seorang pemimpin berkewajiban untuk melindungi *Joa*'nya dari kesewenang-wenangan dari bangsawan lain, pencurian, atau berbagai ancaman lain, serta memperhatikan kesejahteraan dan melindungi mereka dari kemiskinan. Sebaliknya, pengikut berkewajiban untuk memberikan

pelayanan kepada *Ajjoareng* nya, misalnya, dengan bekerja di lahan atau rumah tuannya, atau menjadi prajurit, dan mengerjakan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya.<sup>24</sup>

Dalam sistem politik orang Bugis tradisional, garis keturunan bukanlah jaminan untuk mendapatkan posisi jabatan politik. Tidak ada aturan mutlak yang dapat dijadikan pedoman dalam proses

---

<sup>23</sup>Kooreman, P.J. 1883. "De feitelijke toestand in het gouvernementsgebied van Celebes en Onderhoorigheden". *Indische Gids* 5 (1883:189)

<sup>24</sup>Pelras, Christian. *Manusia Bugis*, halaman 11;1981.

suksesi suatu kontestasi politik. Namun terdapat sebuah petunjuk yang menggariskan bahwa untuk jabatan tertentu, calon yang akan dipilih biasanya mesti salah seseorang dari sekian banyak keturunan pemegang jabatan sebelumnya, dan dia sendiri berasal dari status tertentu saja. Jadi akan terdapat beberapa kandidat yang memiliki hak yang kurang lebih sama untuk berkompetisi dalam suksesi tersebut. Faktor utama yang dapat memenangkan adalah kandidat yang memiliki pengikut paling banyak serta didukung oleh pengikut yang paling berpengaruh. Jadi secara mendasar pengikut (*joa'*) dapat dibedakan dua jenis. Pertama, pengikut dari kalangan orang biasa, yang mengabdikan langsung kepadanya dengan misalnya, menjadi prajurit dalam pasukannya. Kedua, adalah pengikut dari kalangan bangsawan yang menjadi pendukung, yang juga memiliki pengikut dan pendukung sendiri.<sup>25</sup>

#### **E. KERANGKA PIKIR**

Peran nilai "*Ajjoareng - joa*" pada partai golongan karya (Golkar) yang hadir ditengah masyarakat kabupaten Bone, memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan politik di Kabupaten Bone. dalam beberapa tahun semenjak era reformasi serta penerapan sistem demokrasi dengan pengimplementasian pemilihan eksekutif dan legislatif setempat secara langsung sehingga menarik untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Untuk memudahkan penjabaran mengenai bagaimana

---

<sup>25</sup>Pelras, Christian. Manusia Bugis, halaman 11;1981.

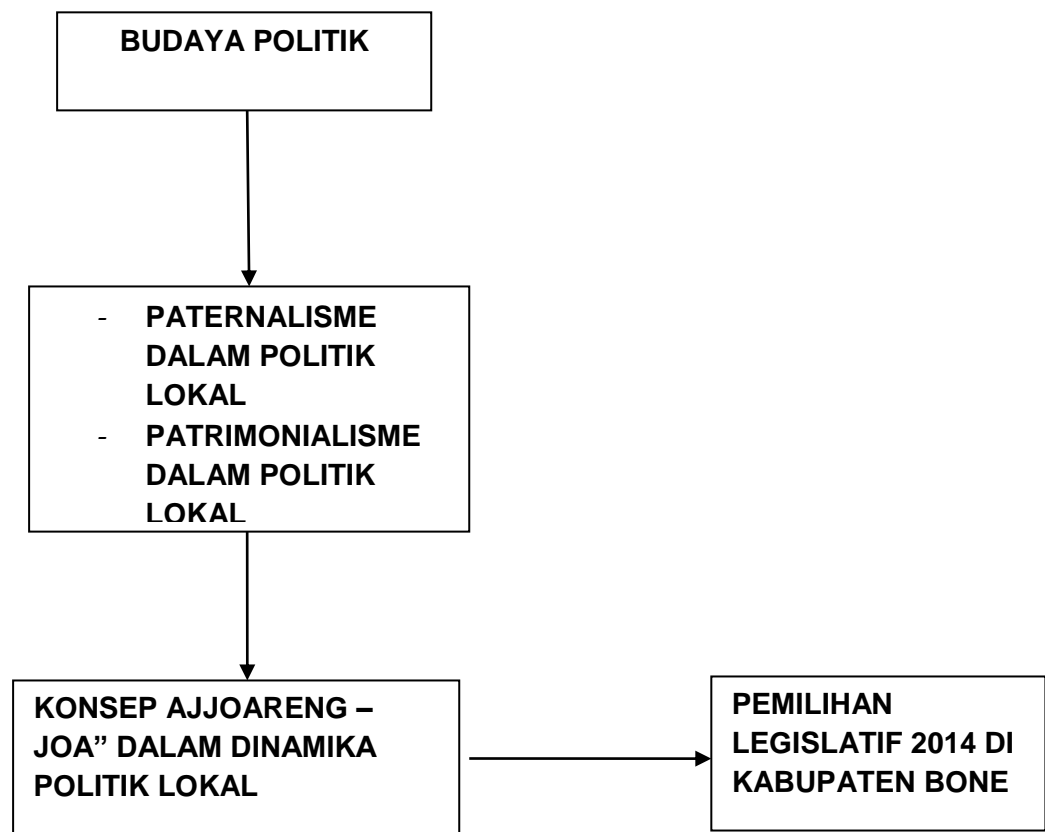


keberadaan nilai “*Ajjoareng - joa*” mampu mempengaruhi konstelasi politik lokal di Kabupaten Bone dan untuk mengetahui seperti apa implementasi nilai budaya tersebut, maka perlu dijabarkan dalam kerangka berpikir dari penulis dengan menghubungkan gambaran yang terjadi dilapangan dengan beberapa teori yang berkaitan dengan masalah tersebut sebagai berikut.

Keberadaan nilai “*Ajjoareng - joa*” di tengah kehidupan masyarakat Bone turut memberi andil dan pengaruh terhadap konstelasi politik lokal setempat, salah satunya dalam pemberian dukungan dan pilihan politik pada proses pemilihan legislative DPRD di Kabupaten Bone . Momen pemilihan legislatif pada bulan April 2014 tersebut dapat memberikan gambaran tentang peraturan politik lokal setempat secara keseluruhan pada waktu kini dan untuk mencoba melihat lebih jauh tentang hal tersebut, perlu menganalisis nilai “*Ajjoareng - joa*” pada posisinya sebagai budaya yang hadir di tengah interaksi antar masyarakat, dalam diri para aktor politik serta masyarakat secara umumnya. Praktik “*Ajjoareng - joa*” pun kemudian terinternalisasi kedalam lingkungan sosial, nilai tersebut berlaku dan dimiliki secara bersama serta menguatkan keberadaannya yang memiliki peran dan pengaruh di tengah kehidupan masyarakat. Nilai “*Ajjoareng - joa*” pada konteks politis memungkinkan mendorong masyarakat dalam menentukan predisposisi atau kecenderungan mereka dalam penentuan pilihan politik terhadap suatu peristiwa politik yang akan atau sedang dihadapinya, kecenderungan

tersebut pada akhirnya menghasilkan sebuah respon politik atau dalam bentuk perilaku politik yang menggambarkan sebuah konstelasi politik lokal dengan indikator hasil suksesi pemilihan, sirkulasi kepemimpinan, alokasi kepentingan, lobby politik dan yang lebih khususnya lagi tentang kontestasi sebuah pemilihan legislatif DPRD di Kabupaten Bone yang menjadi batasan dalam penelitian ini.

#### **F. SKEMA KERANGKA PIKIR**



**Gambar 1. Kerangka Pikir**

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Tipe dan Desain Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis melakukan langkah pertama dengan menentukan informan kunci (*key informan*) yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. Alasan penulis memilih tipe dan desain penelitian secara deskriptif kualitatif karena dengan tinjauan tersebut, akan sangat membantu mendapatkan data atau informasi secara faktual tentang penggambaran praktek *ajjoareng-joa'* sebagai salah satu term yang mempengaruhi konstelasi politik lokal di Kabupaten Bone. Untuk menganalisis peran budaya serta implementasinya dalam kehidupan politik masyarakat setempat diperlukan suatu metode guna mengenal struktur masyarakat yang ada, aspek kepribadian baik secara personal maupun sebagai karakteristik sosial dan lain sebagainya, yang kesemuanya tersebut merupakan suatu mata rantai tak terpisah hubungannya satu sama lain, dan dianggap penulis dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif akan sangat membantu dalam proses penelitian yang dilakukan sehingga mampu mendapatkan data dan informasi yang faktual dan tepat.

## **B. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian, peneliti mengambil beberapa lokasi pada daerah kecamatan di Kabupaten Bone yaitu daerah dengan pertimbangan bahwa lokasi yang dimaksud merupakan interpretasi baik secara demografis, kultural dan geografis dari Kabupaten Bone, yang merupakan salah satu daerah yang terus mengalami kehidupan politik yang dinamis semenjak era reformasi dengan penerapan sistem pemilihan secara langsung. Perubahan yang terjadi meliputi pergantian kepemimpinan pemerintahan setempat, potret mengenai suksesi pemilihan, pola distribusi/alokasi kepentingan, lobi politik serta system social politik yang berlaku di dalamnya mengidentifikasikan sebuah dinamika kehidupan politik lokal. Selanjutnya, di tengah masyarakat hadir sebuah nilai budaya yang mengakar dan mengambil peran dalam mempengaruhi dinamika politik lokal tersebut yakni nilai “*Ajjoareng-joa*”, eksistensi nilai budaya tersebut turut memberi warna terhadap kondisi politik lokal maupun nasional sehingga menarik untuk dijadikan sebagai objek penelitian.

## **C. Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Sebagaimana dalam penelitian kualitatif maka penulis menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan cara terbuka dimana

informan mengetahui kehadiran penulis sebagai peneliti yang melakukan wawancara di lokasi penelitian, dan dalam melakukan wawancara dengan para informan, penulis menggunakan alat rekam dan alat tulis menulis sebagai alat bantu. Adapun key informan yang terpilih dalam pengumpulan data ini adalah :

1. H.Ambo Dalle M.Si Wakil Bupati Kab.Bone juga sebagai Ketua Dewan Penasehat Golkar Kabupaten Bone
2. Hj. Adriani A. Page, SE,Tokoh Politik Partai Golkar juga sebagai anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bone Dapil IV.
3. Andi Mursalim. Seorang budayawan, pejabat birokrasi sekaligus pemuka masyarakat.
4. Andi Mappanyukki Takka, Tokoh Politik Partai Golkar juga sebagai anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bone Dapil IV.
5. Kaharuddin, Tokoh masyarakat kecamatan Lamuru
6. Andi Hamka. Tokoh Politik Golkar Juga sebagai Ketua PAC Golkar Kec.amatan Bengo.
7. Ahmad Riadi Tokoh Politik Golkar juga sebagai Ketua PAC Partai Golkar Kecamatan Lappariaja
8. A.Burhanuddin Tokoh Politik Golkar juga sebagai Mantan ketua PAC partai Golkar Kecamatan Ulaweng.
9. H.Andi Bahram Sebbu BE,S.Sos,Tokoh Politik Golkar juga sebagai Dewan Penasihat Golkar Bone

## **2. Data sekunder**

Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan instansi, seperti :

1. Mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, koran, serta literatur-literatur lainnya yang relevan dengan obyek yang diteliti.
2. Data yang diperoleh dari instansi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
3. Data yang diperoleh dari Sekertariat Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Bone

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam dengan *key informan* yaitu orang yang dianggap paham dan mengetahui masalah yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat peneliti agar wawancara tetap berada pada fokus penelitian, meski tidak menutup kemungkinan terdapat pertanyaan-pertanyaan berlanjut. Pemilihan informan dapat berkembang dan berubah sesuai dengan kebutuhan penelitian demi memperoleh data yang akurat.

## **2. Pemilihan Informan**

Selama penelitian, penulis menggunakan teknik *snowballing*. Cara memperoleh informan dengan teknik ini yang pertama adalah menemukan *gatekeeper* yang paham tentang objek penelitian dan dapat membantu penulis selama penelitian ini sekaligus orang pertama yang diwawancarai, kemudian dapat menunjukkan informan lain yang lebih paham dan dapat diwawancarai untuk melengkapi informasi yang sudah didapat penulis.

## **3. Dokumen/Arsip**

Dokumen dan arsip mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa dokumen tertulis, gambar/foto, rekaman audio atau film audio-visual. Selain itu data statistik, laporan penelitian sebelumnya serta tulisan-tulisan ilmiah merupakan dokumen penting yang perlu ditelusuri untuk memperkaya data yang dikumpulkan.

## **E. Teknis Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus, sehingga datanya akan lebih mendalam. Teknik analisis yang demikian ini mengikuti pendekatan analisis kualitatif dengan menggunakan model Miles and Huberman<sup>26</sup>. Oleh karena itu, analisis

---

<sup>26</sup>Huberman, A. Michael dan Matthew B. Miles. *"Analisis Data Kualitatif"*. Jakarta : UII Press.1992.

datanya meliputi tiga tahapan. Pertama, reduksi data (*data reduction*), yakni merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting dari sejumlah data lapangan yang telah diperoleh lalu mencari polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang implikasi nilai Ajoareng-joa' dan pengaruhnya terhadap konstelasi politik di Kabupaten Bone pada konteks pemilihan legislatif. Kedua, penyajian data (*data display*), yakni menampilkan data yang telah direduksi yang sifatnya sudah terorganisasikan dan mudah dipahami. Ketiga, kesimpulan (*conclusion drawing*), yakni akumulasi dari kesimpulan awal yang disertai dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten (kredibel), sehingga kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab permasalahan penelitian.



## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Disisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian.

#### **A. Sejarah Singkat Kabupaten Bone**

Sejarah mencatat bahwa bone merupakan salah satu kerajaan besar di nusantara pada masa lalu. Kerajaan bone yang dalam catatan sejarah didirikan oleh ManurungngE Rimatajang pada tahun 1330, mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan LatenritattaTowapptunru Daeng Serang Datu Mario Riwawo Aru Palakka Malampe'eGemmekna Petta TorisompaeMatinroe Ri Bontoala, pertengahan abad ke-17 (A.Sultan Kasim, 2002). Kebesaran Kerajaan Bone tersebut dapat pelajaran dan hikmah yang memadai bagi masyarakat Bone saat ini dalam rangka menjawab dinamika pembangunan dan perubahan-

perubahan sosial, perubahan ekonomi, pergeseran budaya serta dalam menghadapi kecenderungan yang bersifat global.

Belajar dan mengambil hikmah dari sejarah Kerajaan Bone pada masa lalu minimal terdapat tiga hal yang bersifat mendasar untuk diaktualisasikan dan dihidupkan kembali karena memiliki persesuaian dengan kebutuhan masyarakat Bone dalam upaya menata kehidupan kearah yang lebih baik. Ketiga hal yang dimaksud adalah : *Pertama*, pelajaran dan hikmah dalam bidang politik dan tata pemerintahan. Dalam hubungannya dengan bidang ini, sistem kerajaan Bone pada masa lalu sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyat atau dalam terminologi politik modern dikenal dengan istilah demokrasi. Ini dibuktikan dengan penerapan representasi kepentingan rakyat melalui lembaga perwakilan mereka di dalam dewan adat yang disebut “ade’ pitue “, yaitu tujuh orang pejabat adat yang bertindak sebagai penasehat raja.

Segala sesuatu yang terjadi dalam kerajaan dimusyawarkan oleh ade’ pitue dan hasil keputusan musyawarah disampaikan kepada raja untuk dilaksanakan. Selain itu di dalam penyelenggaraan pemerintah sangat mengedepankan azas kemanusiaan dan musyawarah. Perinsip ini berawal dari pesan Kajaolaliddong seorang cerdik cendikia Bone yang hidup pada tahun 1507-1566 yang pernah diampaikan oleh Raja Bone seperti dikemukakan oleh *Wiwiek P Yoesoep* (1982:10) bahwa terdapat empat faktor yang membesarkan kerajaan yaitu :

- Seuwani, Temmatinroi Matanna Arung MangkauEmitai munrinna gauE ( Mata Raja tak pernah terpejam memikirkan segala perbuatan).
- Maduanna, Maccapi Arung MangkauE duppai ada' (Raja harus pintar menjawab kata-kata).
- Matellunna, Maccapi Arung Mangkaue mpinru ada' (Raja harus pintar membuat kata-kata dan jawaban).
- Maeppa'na, Tekkalupai surona mpawa ada tongeng (Duta tidak lupa menyampaikan kata-kata yang benar).

Pesan Kajaolaliddong ini antara lain dapat diinterpretasikan kedalam pemaknaan yang mendalam bagi seorang raja betapa pentingnya perasaan, pikiran dan kehendak rakyat dipahami dan disikapi.

*Kedua*, yang menjadi pelajaran dan hikmah dari sejarah Bone terletak pada pandangan yang meletakkan kerjasama dengan daerah lain, dan pendekatan diplomasi sebagai bagian penting dari usaha membangun negeri agar menjadi lebih baik. Urgensi terhadap pandangan seperti itu tampak jelas ketika kita menelusuri puncak-puncak kejayaan Bone dimasa lalu.

Sebagai bentuk monumental dari pandangan ini dikenal dalam sejarah akan perjanjian dan ikrar bersama kerajaan Bone, Wajo, dan Soppeng yang melahirkan "*Tellum Poccoe*" atau dengan sebutan lain

“LaMumpatue Ri Timurung” yang dimaksudkan sebagai upaya memperkuat posisi kerajaan dalam menghadapi tantangan dari luar.

Kemudian pelajaran dan hikmah yang *ketiga* dapat dipetik dari sejarah Kerajaan Bone adalah warisan budaya kaya dengan pesan. Pesan kemanusiaan yang mencerminkan kecerdasan manusia Bone pada masa lalu. Banyak referensi yang bisa dipetik dari sari pati ajaran islam dalam menghadapi kehidupan, dalam menjawab tantangan pembangunan dan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang semakin cepat. Namun yang terpenting adalah bahwa semangat religiusitas orang Bone dapat menjawab perkembangan zaman dengan segala bentuk dan dinamikanya. Demikian halnya (Kabupaten Bone) potensi yang besar yang dimiliki, yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan demi kemakmuran rakyat.

Potensi itu cukup beragam seperti dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Kelautan, Pariwisata dan potensi lainnya. Demikian masyarakatnya dengan berbagai latar belakang pengalaman dan pendidikan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendorong pelaksanaan pembangunan Bone itu sendiri. Walaupun Bone memiliki warisan sejarah dan budaya yang cukup memadai, potensi sumber daya alam serta dukungan SDM, namun patut digaris bawahi jika saat ini dan untuk perkembangan kedepan Bone akan berhadapan dengan berbagai perubahan dan tantangan pembangunan yang cukup berat.

Oleh karena itu diperlukan pemikiran, gagasan dan perencanaan yang tepat dalam mengorganisir warisan sejarah, kekayaan budaya dan potensi yang dimiliki ke dalam suatu pengelolaan pemerintah dan pembangunan.

**Tabel 1**  
**Sejarah Singkat Pemerintahan Bone**  
**dan Daftar Susunan Raja-Raja Bone**

<b>Raja ke</b>	<b>Nama dan Gelar</b>	<b>Tahun Pemerintahan</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	ManurungE Ri Matajang Mata Si Lompo	± 1330 – 1365	Pria
2	Laummasa' – Petta Panre BessiE	± 1365 – 1368	Pria
3	La Saliu Kerang Pelua	± 1368 – 1470	Pria
4	We Benrigau' – MallajangE ri Cina	± 1470 – 1510	Wanita
5	Latenrri Sukki – MappajungE	± 1510 – 1535	Pria
6	La Ulio' Boto'E – MatinroE Ri Itterung	± 1535 – 1560	Pria
7	La Tenri Rawe – BongkangngE Matinro ri Gucinna	± 1560 – 1564	Pria
8	La Icca – Matinroe ri Addenenna	± 1564 – 1565	Pria
9	La Pattawwe' – MatinroeE ri Bettung	± 1565 – 1602	Pria
10	I Tenri Tuppu – MatinroE Sidenreng	± 1602 – 1611	wanita
11	La Tenri Ruwa - Sultan Adam MatinroE ri BantaEng	± 1611 – 1616	Pria
12	La Tenri Pale – MatinroE ri Tallo	± 1616 – 1631	Pria
13	La Maddaremmeng – MatinroE ri Bukaka	± 1631 – 1644	Pria
14	La Tenri Waji Arung Awangpone MatinroE ri Siang (pangkep)	± 1644 – 1645	Pria
15	Latenri Tatta Daeng Serang MalampeE Gemme'na Arung Palakka	± 1645 – 1696	Pria
16	La Patau' Matanna Tikka MatinroE ri Nagauleng	± 1696 – 1714	Pria
17	Batari Toja Sultan Zainab Zukiyahuddin	± 1714 – 1715	Pria
18	La Padassajati To Appaware Sultan Sulaeman Petta ri JalloE	± 1715 – 1718	Pria
19	La Pareppa To Sappewali Sultan Ismail MatinroE ri Sombaopu	± 1718 – 1721	Pria
20	La Panongi – To Pawawoi Arung Mampu Karaeng Bisei	± 1721 – 1724	Pria
21	Batari Toja Datu Talaga Arung Timurung	± 1724 – 1749	wanita
22	La Temmasonge To Appawali Sultan Abd.Razak MatinroE ri Mallimongeng	± 1749 – 1775	Pria
23	La Tenri Tappu – Sultan Ahmad Saleh	± 1775 – 1812	Pria
24	To Appatunru – Sultan Ismail Muhtajuddin MatinroE ri Lalebata	± 1812 – 1823	Pria
25	I mani ratu arung data sultan rajituddin matinroe ri kessi	± 1823 – 1835	wanita
26	La Mappaselling – Sultan Adam Najamuddin MatinroE ri Salassa'na	± 1835 – 1845	Pria
27	La Parenrengi Sult.Akhmad Muhiddin Arungpugi MatinroERiAjangBenteng	± 1845 – 1857	Pria

28	Watenria Wa Ummulhuda Pancaitana-BesseKajuara MatinroE ri Majennang	± 1857 – 1860	wanita
29	Akhmad Singkerurukka Sultan Akhmad Idris MatinroE ri To Pacing	± 1860 – 1871	Pria
30	Fatimah Banri Datu Citta MatinroE ri Bolampare'na	± 1871 – 1895	wanita
31	Lapawawoi – karaeng sigeri matinroe ri bandung	± 1895 – 1905	Pria
32	La Mappanyukki Sultan Ibrahim MatinroE ri GOWA	± 1905 – 1946	Pria
33	La pabbenteng Pt. Matinroe ri Matuju	± 1945 – 1951	Pria

*Sumber : Bone Dalam Angka 2016*

**Tabel 2**  
**Nama- Nama Pimpinan yang Memerintah**  
**Daerah Bone Secara Berurutan**

No	Nama yang Memerintah	Masa Pemerintahan
(1)	(2)	(3)
1	Abdul Rachman Daeng Mangung (Kepala Afdeling)	Tahun 1951
2	Andi Pangerang Daeng Rani (Kepala Afdeling/Kepala Daerah)	Tahun 1951 – 1955
3	Ma'mun Daeng Mattiro (Kepala Daerah)	Tahun 1955 – 1957
4	H.A Mappanyukki Sult. Ibrahim MATINROE ri gowa (Kepala Daerah/Raja Bone)	Tahun 1957 – 1960
5	Andi Suradi (Bupati Kepala Daerah)	Tahun 1960 – 1966
6	Andi Djamuddin (Pejabat Bupati Kepala Daerah)	Tahun 1966 – 1967
7	Andi Tjatjo (yang menjalankan Bupati Kepala Daerah)	Tahun 1967 – 1969
8	Andi Baso Amir (Bupati Kepala Daerah)	Tahun 1969 – 1976
9	Suaib (Bupati Kepala Daerah)	Tahun 1976 – 1982
10	H.P.B Harahap (Bupati Kepala Daerah)	Tahun 1982 – 1983
11	H. Andi Madeali (Pejabat Bupati Kepala Daerah)	Tahun 1983 – 1988
12	Andi Syamsu Alam (Bupati Kepala Daerah)	Tahun 1988 – 1993
13	Andi Sjamsoel Alam (Bupati Kepala Daerah)	Tahun 1993 – 1998
14	Andi Muhammad Amir (Bupati Kepala Daerah)	Tahun 1998 – 2003
15	H. Andi Muh. Idris Galigo (Bupati Kepala Daerah)	Tahun 2003 – 2008
16	H. Andi Muh. Idris Galigo (Bupati Bone)	Tahun 2008 – 2013
17	H.A.Fashar M.Padjalangi (Bupati Bone)	Tahun 2013 – 2018

*Sumber : Bone Dalam Angka 2016*

Pada tahun 1905 Kerajaan Bone jatuh ketanganan penjajah dan terbentuk pemerintahan sendiri (Zelf Bestur) di bawah pengawasan Belanda, berhubung karena sejak tertangkapnya Raja Bone Lapawawoi Karaeng Sigeri, tahta Kerajaan Bone tidak terisi maka atas usaha Belanda pada tahun 1931 diangkat Latenri Sukki (Andi Mappanyukki) putra dari La

Makkulawu Karaeng Lembampareng Sombaya ri Gowa menjadi Raja Bone Ke-32 (1931-1946). Oleh karena itu Raja Bone Ke-32 tidak menerima keberadaan NICA maka pada awal 1946 menarik diri dari tahta kerajaan dan digantikan oleh Raja Bone Ke-33 La Pabbenteng Petta MatinroE ri Matuju yang bertahta (1946-1951).

Kabupaten Bone terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) kecamatan yang dirperinci menjadi 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) desa dan 39 (tiga puluh sembilan) kelurahan dengan jumlah dusun sebanyak 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) dan lingkungan sebanyak 121 (seratus dua puluh satu). Wilayah Kecamatan **Bontocani** terdiri dari 10 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Kahu** terdiri dari 19 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Kajuara** terdiri dari 17 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Salomekko** terdiri dari 7 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Tonra** terdiri dari 11 desa. Kecamatan **Patimpeng** terdiri dari 10 desa. Kecamatan **Libureng** terdiri dari 19 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Mare** terdiri dari 17 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Sibulue** terdiri dari 19 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Cina** terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Barebbo** terdiri dari 18 desa. Kecamatan **Ponre** terdiri dari 9 desa. Kecamatan **Lappariaja** terdiri dari 9 desa. Kecamatan **Lamuru** terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Tellu Limpoe** terdiri dari 11 desa. Kecamatan **Bengo** terdiri dari 9 desa. Kecamatan **Ulaweng** terdiri dari 14 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Palakka** terdiri dari 15 desa. Kecamatan **Awangpone** terdiri dari 17 desa dan 1 kelurahan.

Kecamatan **Tellu Siattinge** terdiri dari 15 desa dan 2 kelurahan. Kecamatan **Amali** terdiri dari 15 desa. Kecamatan **Ajangale** terdiri dari 14 desa. Kecamatan **Dua Boccoe** terdiri dari 21 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Cenrana** terdiri dari 15 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Tanete Riattang Barat** terdiri dari 8 kelurahan. Kecamatan **Tanete Riattang** terdiri dari 8 kelurahan. Serta Kecamatan **Tanete Riattang Timur** terdiri dari 8 kelurahan juga. Berdasarkan Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 15 Pebruari 1990 ditetapkan hari jadi Bone pada tanggal 6 April 1330. Dengan demikian Hari Ulang Tahun Bone ditetapkan pada tanggal 6 April.

#### **B. Kondisi Politik Kabupaten Bone**

Di kabupaten Bone Sulawesi Selatan ada 12 partai politik peserta pemilu calon anggota legislatif Tahun 2014, tetapi tidak semua partai politik dapat meloloskan calonnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bone karena jumlah suara dukungan yang tidak mencapai dari konstituen. Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang memberikan kesempatan pada partai politik menyiapkan calon paling banyak 100 % (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

Partai Politik yang bertarung pada pemilihan legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

**Tabel 3**



### Daftar Partai Peserta Pemilu Tahun 2014 di Kabupaen Bone

Nomor Urut	Partai Politik
(1)	(2)
1	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
3	PARTAI Keadilan Sejahtera
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Perjuangan
5	PARTAI GOLONGAN KARYA
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
7	PARTAI DEMOKRAT
8	PARTAI AMANAT NASIONAL
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
11	PARTAI BULAN BINTANG
12	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia

*Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2016*

### C. Gambaran daerah pemilihan DPRD Kabupaten Bone dan Jumlah Kursi

Pemetaan Daerah Pemilihan dalam pemilu 2014 merupakan salah satu rangkaian terpenting mengingat sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Sistem ini lebih memungkinkan masyarakat pemilih dalam menentukan calon anggota legislatif. Selain itu, alokasi kursi yang tersedia dan diperebutkan dalam pemilu dibagi berdasarkan jumlah penduduk hak pilih dalam sebuah wilayah yang disebut Daerah Pemilihan (Dapil).

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi;

*‘Daerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan’.*

Dalam melakukan pemetaan daerah pemilihan, KPU Kabupaten Bone mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 178/SK/KPU/TAHUN 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah penduduk, dan jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone. Dengan ketentuan ini maka Daerah Pemilihan (DAPIL) untuk pemilu umum legislatif tahun 2014 yaitu 5 (lima) Daerah Pemilihan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Daerah Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bone Tahun 2014**

No	Kecamatan/Gabungan Kecamatan	Partai Politik
(1)	(2)	(3)
1	TANETE RIATTANG TANETE RIATTANG TIMUR TANETE RIATTANG BARAT PALAKKA	Dapil I
2	SIBULUE BAREBBO CINA MARE TONRA PONRE	Dapil II
3	SALOMEKKO KAJUARA KAHU BONTOCANI PATIMPENG LIBURENG	Dapil III
4	ULAWENG AMALI	Dapil IV

	BENGO LAPPA RIAJA LAMURU TELLU LIMPOE	
5	AWANGPONE TELLU SIATTINGE CENRANA DUABOCCOE AJANGALE	Dapil V

*Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2016*

Setelah pemetaan daerah pemilihan, maka dilakukan penentuan atau penetapan alokasi kursi di masing-masing Daerah Pemilihan. Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 26 ayat (1), yang berbunyi;

*Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh).*

**Tabel.5**

**Alokasi Kursi Pemilihan Umum Tahun 2014 DPRD Kabupaten Bone**

<b>Dapil Bone</b>	<b>Kecamatan/Gabungan Kecamatan</b>	<b>Alokasi Kursi</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1	TANETE RIATTANG TANETE RIATTANG TIMUR TANETE RIATTANG BARAT PALAKKA	10 Kursi
2	SIBULUE BAREBBO CINA MARE TONRA PONRE	8 Kursi
3	SALOMEKKO KAJUARA KAHU BONTOCANI PATIMPENG LIBURENG	9 Kursi
4	ULAWENG AMALI	8 Kursi

	BENGO LAPPA RIAJA LAMURU TELLU LIMPOE	
5	AWANGPONE TELLU SIATTINGE CENRANA DUABOCCOE AJANGALE	10 Kursi

*Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2016*

#### **D. Gambaran Umum Objek Penelitian (Partai Golkar Kabupaten Bone)**

Setiap partai yang tumbuh memiliki visi dan misi sendiri dalam melaksanakan kebijakannya. Adapun visi dan misi dari Partai Golongan Karya adalah:

##### **1. Visi Partai Golongan Karya,<sup>27</sup>yaitu:**

- a. Golkar adalah partai terbuka dari segenap golongan dan lapisan masyarakat tanpa membedakan latarbelakang agama, suku, bahasa dan status sosial ekonomi
- b. Golkar adalah partai mandiri yang merupakan organisasi kekuatan sosial politik yang mampu mengambil setiap keputusan politik dan kebijakan organisasi tanpa campur tangan atau intervensi dari siapapun atau pihak manapun. Partai Golkar adalah partai independen, baik secara structural maupun kultural.
- c. Golkar adalah partai yang demokratis sebagai partai yang demokratis Golkar senantiasa baik secara internal maupun

---

<sup>27</sup>HasilMunas VIII PartaiGolkarTahun 2009 "Suara Rakyat SuaraGolkar" Hal. 82. SekretariatJendraldewanPimpinanPusatpartaiGolkarTahun 2009.

eksternal benar-benar menjadi pelopor tegaknya kehidupan politik yang demokratis dan terbuka.

- d. Golkar adalah partai moderat, sebagai partai yang moderat Golkar senantiasa mengutamakan posisi tengah (moderat) dan tidak berorientasi ke kiri atau ke kanan secara ekstrim. Dengan demikian Partai Golkar baru mengembangkan sikap non-sekretarian bahkan dapat dikatakan anti sekretarian. Visi politik moderat adalah visi yang dianggap paling tepat dengan menyadari sosiologis dan politis dari masyarakat Indonesia yang majemuk.
- e. Golkar adalah partai yang solid, sebagai partai yang solid Golkar secara utuh dan kukuh senantiasa mendayagunakan potensi yang dimiliki secara strategis. Dengan visi ini, Golkar melakukan konsolidasi organisasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan mengembangkan manajemen organisasi yang modern dan canggih.
- f. Golkar adalah partai yang mengakar. Sebagai partai yang mengakar Golkar senantiasa mengupayakan agar para anggota dan kadernya tumbuh dan berkembang dari bawah berdasarkan asas prestasi, bukan berdasarkan atas asas prestasi, bukan berdasarkan atas asas kolusi dan nepotisme.
- g. Golkar adalah partai yang responsif. Sebagai partai yang responsif Golkar senantiasa peka dan tanggap terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat, serta konsisten untuk memperjuangkan

keputusan politik yang bersifat public dan menguntungkan seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang, suku, etnis, agama, bahasa, aliran dan kebudayaan.

2. Misi Partai Golongan Karya, <sup>28</sup>adalah:

- a. Mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik.
- b. Melakukan rekrutmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi (*merit system*) untuk dapat dipilih oleh rakyat untuk menduduki posisi-posisi politik atau jabatan-jabatan publik. Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para kader dapat mengontrol atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabdikan bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
- c. Meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang dialogis dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai pikiran, aspirasi dan kritik masyarakat.

Golkar mempunyai 5 asas dalam berpartai politik diantaranya:

- a. Asas kepemimpinan pancasila
- b. Asas demokrasi pancasila
- c. Asas keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan pribadi/kepentingan golongan

---

<sup>28</sup> Ibid Hal. 82

- d. Asas kekeluargaan dan gotong royong
- e. Asas tidak kenal menyerah dalam perjuangan

Tujuan dari Partai Golkar, adalah:

- a. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD 1945
- b. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945
- c. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spirial berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menghormati dan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, hukum dan hak azasi manusia.<sup>29</sup>

Partai Golkar merupakan partai besar yang relatif mendominasi dalam Pemilu di Kabupaten Bone. Terbukti elit-elit dari partai ini selalu mengisi alokasi kursi anggota legislatif yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum pada Pemilu Legislatif Tahun 2014. Partai Golkar adalah salah satu partai politik telah berurat dan berakar eksistensinya di Kabupaten Bone dengan perangkat organisasi yang telah lama terbentuk dan berkesinambungan hingga struktur pimpinan desa dan kelurahan bahkan kelompok-kelompok kader (Pokkar) yang masih eksis dalam

---

<sup>29</sup> Ibid hal.32

setiap dusun dan lingkungan. Partai Golkar masih mampu mendominasi setiap event politik namun khususnya pada hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 dengan perolehan 15 dari 45 kursi telah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 yang mendapat 18 dari 45 kursi DPRD yang ditetapkan oleh KPUD. Penurunan tersebut diakibatkan oleh semakin mapannya partai-partai politik pesaing yang memperoleh kursi berkat dukungan oleh konstituen di Kabupaten Bone.

Dari 8 Kursi yang diperebutkan di Dapil IV, Partai Golongan karya berhasil mendudukkan 3 (tiga) orang Calegnya di Parlemen, sementara partai lainnya yakni, PAN, Gerindra, Demokrat, Nasdem, dan PBB masing-masing 1(satu) kursi.

**Tabel 6**  
**Perolehan suara Partai Golkar di Dapil 4 Bone :**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jumlah Suara</b>
<b>1</b>	Andi Alimin Rahman	2.710
<b>2</b>	Ir.Hj. Humaerah	3.730
<b>3</b>	Ir. Andi Burhanuddin	2.313
<b>4</b>	Andi Mappanyukki Takka	4.717
<b>5</b>	Hj. Adriani A.Page ,SE	5.587
<b>6</b>	Irwandi Burhan ,SE	4315
<b>7</b>	H.kasman Galib , SE,MM	3.452
<b>8</b>	Hj. Fatmawati, SH.MH	572

*Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2016*



Dengan Hasil Tersebut Partai Golongan Karya (GOLKAR) kembali Mendominasi perolehan suara di daerah pemilihan IV Kabupaten Bone dan ini kembali mempertegas bahwa kemampuan seorang pemimpin untuk menjaga pengikutnya adalah hal wajib untuk mendapatkan kemenangan dalam momen politik yang terjadi.

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kecenderungan individu untuk mengelompokkan diri berdasarkan ikatan kekerabatan, pertalian emosional dan kepentingan dilihat sebagai hal yang alamiah dan sangat wajar terjadi, baik itu oleh ahli teori sejarah maupun ilmuwan politik kontemporer. Maka tak mengherankan bahwa dengan kelompok-kelompok tersebut dilihat dengan cara ini oleh mereka yang mengkaji politik. Interaksi kelompok-kelompok dan para pelaku politik dalam masyarakat paling baik dikonsepsikan melalui diskusi tentang interaksi masyarakat, jaringan sosial politik dan modal sosial. Ketiga komponen tersebut menurut penulis adalah agregat dari sumber daya sosial yang kemudian terakumulasi menjadi pendorong individu-individu untuk bertindak bersama demi mencapai tujuan bersama. Dengan kehadiran demokrasi sebagai sebuah sistem dan pengaplikasian metode pemilihan secara langsung, muncul kebutuhan untuk memperhatikan preferensi dan predisposisi individu. Kerap kali, kedua hal ini diakui dan dimiliki bersama oleh individu yang merasa memiliki persamaan, seperti persamaan asal daerah, rumpun keluarga dan kepentingan yang secara prinsip sama seperti halnya pemenuhan kebutuhan sosial. Oleh sebab itu, tampaknya mustahil memandang politik tanpa memperhatikan efek lingkungan termasuk sub-sub kultural terhadap sistem secara keseluruhan, salah satunya yakni norma dan nilai-nilai yang terus

bekerja di tengah kehidupan masyarakat, sebuah nilai yang melandasi terjalannya pertalian emosional dan ikatan kekerabatan.

Setiap orang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang kuat, apabila dihadapkan pada sesuatu pilihan maka mereka akan berada pada posisi terakhir untuk memilih tidak memutuskan hubungan kekerabatan dan membangun solidaritas kaum atau solidaritas kekerabatan dimana didalamnya teramu kesepakatan alamiah untuk saling menolong saling menguatkan antar mereka. Seperti itulah halnya yang berlaku dalam konsepsi sosial dan politik yang dimiliki masyarakat Bone, stimulasi perihal tersebut sudah lama terjaga melalui tradisi berkehidupan sosial yang salah satunya tertuangkan melalui konsep nilai *Ajjoareng – joa'* dan nilai tersebut menjadi perihal nyata yang berfungsi sebagai pertimbangan dalam setiap hubungan sosial masyarakat suatu daerah di Kabupaten Bone, secara praktis nilai tersebut mampu dikonsepsikan sebagai bentuk kepedulian, meringankan beban dan persoalan seseorang dengan wujud bantu membantu, keprihatinan dan sikap-sikap lainnya yang berhubungan dengan jiwa saling menolong antar sesama yang diberikan oleh seorang pihak ke pihak lainnya dan secara naluriah orang lainnya juga akan berlaku sama seperti apa yang telah dirasakannya sehingga konsepsi nilai tersebut menjadi sebuah pola resiprositas pada setiap hubungan antar sesama masyarakat, menjadi sebuah nilai/norma yang hendaknya diberlakukan oleh masing-masing orang atau sederhananya dalam pemahaman masyarakat bisa dikatakan bahwa seorang yang telah

diberikan sesuatu lantas baginya hendak membalasnya pula dengan takaran yang dirasanya sama bahkan lebih atau dengan kata lain mereka teridentikkan sebagai orang yang sangat tahu membalas budi. Tak jarang pola interaksi yang demikian dijadikan sebagai nilai yang ada pada sikap seorang aktor atau calon legislatif dalam upayanya mendapat simpati dan dukungan masyarakat pemilih dalam suksesi pemilu.

#### **A. Implementasi Nilai *Ajjoareng – joa'* dalam proses pemilihan Legislatif**

Perilaku ***Ajjoareng – joa'*** dalam kehidupan masyarakat Bone adalah praktek keseharian yang dinilai luhur dan telah berlangsung sejak lama, ***Ajjoareng – joa'*** telah menjadi sebuah pola interaksi sosial dan tradisi hubungan tersebut mengalir dari generasi pendahulu sampai pada generasi yang sekarang. Dalam situasi perkembangan zaman praktek nilai ***Ajjoareng – joa'*** dianggap sudah mulai terkikis secara perlahan tapi dalam beberapa hal pokok dan bidang kemasyarakatan sikap menjunjung tinggi rasa menghormati saling membantu dan saling memperhatikan itu masih dominan dalam kehidupan masyarakat Bone, salah seorang masyarakat Bone mengatakan :

*“Nilai Ajjoareng – joa’ yang ada di dalam masyarakat dengan interaksi yang tinggi masih dominan atau masih berlaku dalam kehidupan keseharian. Dan Pola tersebut masih bertahan disebabkan oleh faktor tingginya tingkat interaksi*

*dalam kehidupan masyarakat dan budaya Ajjoareng – joa’ yang mengakar pada masyarakat serta faktor sifat alamiah manusia sebagai makhluk sosial.”<sup>30</sup>*

Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat interaksi yang ada dalam hubungan antar masyarakat, semakin kuat tradisi saling berhubungan sosial antar mereka, maka perilaku **Ajjoareng – joa’** itupun menjadi semakin nampak dalam keseharian masyarakat Bone. komunikasi dan kontak sosial memungkinkan kerja sama antar perorangan dan atau antar kelompok. Berdasarkan beberapa gambaran umum tersebut perilaku saling menghargai yang merupakan aspek mendasar nilai *Ajjoareng-joa’* yang pada dasarnya mendorong seseorang atau sekelompok orang dalam bersikap termasuk menjadi landasan melakukan interaksi sosial sampai interaksi politik. Seorang informan mengatakan :

*“Dalam pemilihan legislatif kebanyakan perilaku Ajjoareng Joa’ berlaku pada masyarakat pedesaan dan dipengaruhi hubungan emosional yang kuat.”<sup>31</sup>*

Berbicara mengenai ajjoareng- joa’ ini secara umum masih sangat kental dilingkungan masyarakat Bone ikatan antara ajjoareng dan joa begitu sangat kuat dan saling mendukung satu sama lain.

---

<sup>30</sup>Keterangan H.Andi Bahram Sebbu BE,S.Sos (tanggal 21 Mei 2016 pukul 19.27 wita)

<sup>31</sup>Keterangan H.Andi Bahram Sebbu BE,S.Sos (tanggal 21 Mei 2016 pukul 19.40 wita)

<sup>32</sup>Wawancara penulis dengan A. Mursalim (Tanggal 19 Mei 2016 pukul 13.00 wita)

A.Mursalim, seorang tokoh pemuda dan pemerhati kebudayaan mengatakan :

*“jika seorang joa’ melakukan sesuatu kegiatan seperti acara pernikahan atau terkena musiba biasanya ajjoareng ini datang memberikan bantuan dan memberi semangat.”<sup>32</sup>*

Dalam berbagai kegiatan masyarakat utamanya berkenan dengan suatu peristiwa dimana seseorang menghadapi peristiwa suka maupun duka, maka para panutan ini akan datang menghampiri, memberi rasa kepedulian yang diantaranya tersimbolkan dengan pemberian sesuatu yang dirasa mampu mewakili orang tersebut berada dalam lingkaran kekerabatan dan pertalian sosial, misalnya menyumbang bahan makanan ataupun peralatan maupun sumbangsi pada seseorang yang melaksanakan pesta, memberi sumbangan dan lain-lain untuk menutupi serta meringankan beban finansial seseorang bahkan sekedar memberi materi untuk menjadikan hubungannya menjadi lebih baik dan kuat.

Dalam sebuah interaksi tercipta sebuah proses sosial yang dapat diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama, misalnya pengaruh-mempengaruhi antara sosial dengan politik, misalnya dalam kehidupan masyarakat Bone keseharian bisa ditemui kecenderungan orang untuk memberikan kepercayaannya untuk dipimpin kepada seorang tokoh yang dikenal baik oleh masyarakat banyak, tokoh tersebut dijadikan pemegang

mandat dalam mengurus urusan pemerintahan misalnya<sup>33</sup>. Seperti yang dikatan oleh seorang informan :

*“Jasa jasa ajjoareng begitu melekat dipikiran masyarakat setempat karena masih terjalin ikatan emosional yang sangat baik antara ajjoareng dan joa’.meski ada pergeseran tapi tidak terlalu signifikan”<sup>34</sup>*

Posisi tokoh dalam hubungan sosial pun demikian, yang memiliki jejak jasa dalam ingatan masyarakat atau dihormati karena pengaruh nama besar keluarga, selanjutnya di satu sisi sang tokoh haruslah aktif dalam interaksi sosial di tengah masyarakat terkait dengan predisposisi bahkan karakteristik masyarakat setempat yang sedemikian dan dari hal-hal semacam itulah dimana aspek hubungan sosial antar masyarakat memengaruhi konsep pemberian dukungan dan kepercayaan politik, konsep kepedulian dan tolong menolong menjadi landasan pengerat hubungan sosial yang memiliki klasifikasi implementasi tertentu berdasarkan stratifikasi sosial yang ada. Seorang tokoh atau setiap masyarakat hendaknya akan menunjukkan sikap tenggang rasa, memberi kepedulian tinggi serta pertolongan kepada orang lain sehingga ia akan mendapatkan penilaian baik dan

---

<sup>33</sup> paradigma tradisional masyarakat yang memandang bahwa orang yang memegang jabatan kekuasaan hanyalah dari kalangan orang yang sejak dahulu punya riwayat sebagai *papparenta* (pemerintah) dalam silsilah keluarganya dan posisi tokoh beserta kerabatnya pada interaksi sosial masyarakat umum juga mendapat posisi khusus sebagai pihak yang lebih dihormati karena dipandang memiliki predikat sosial yang baik di tengah masyarakat, disisi lain seorang tokoh masyarakat haruslah memiliki tanggung jawab moral atas pemberian rasa hormat dan kepercayaan tersebut. *Getteng na malempu* (sifat “jujur” dan lurus), jadi seorang tokoh pada masyarakat Bone punya beban sosial juga ketika ditempatkan dalam posisi yang dihormati dan didengar oleh masyarakatnya serta ketika tidak memenuhi semacam kriteria dan simpati masyarakat menjadi hilang maka kekuatan sang tokoh pasti akan berkurang yang selanjutnya penghormatan dan kepercayaan masyarakat diberikan kepada tokoh-tokoh yang lain yang memiliki predikat sosial yang lebih baik.

<sup>34</sup>.wawancara penulis dengan Kaharuddin (Tanggal 22 mei 2016 pukul 16.00 wita)

memiliki simpanan jasa yang sewaktu kemudian bisa ia dapatkan dari orang yang pernah diberikan pertolongan olehnya.

Hubungan kedekatan sosial yang terjadi secara alamiah menghasilkan daya rekat antara mereka, hubungan dengan keluarga, para tetangga sekampung dan sebagainya dan begitupun sebaliknya bila terasa syarat kedekatan itu tidak terpenuhi akan ada semacam keterputusan dalam hubungan tersebut. Kedekatan emosional membuat para masyarakat secara naluriah akan saling berusaha memenuhi kebutuhan masing-masing termasuk pemenuhan kepentingan..

Dalam hal politis, mendapat simpati dan dukungan masyarakat oleh para aktor haruslah meninjau betapa besar pengaruh hubungan sosial dalam membentuk kecenderungan masyarakat dalam menentukan sikap dan pilihan politik, sebaliknya bila banyak masyarakat yang menilai seorang figur tidak menunjukkan sikap menjaga kekerabatan dan kepedulian sosial diantara orang sekitarnya maka dukungan dan kepercayaan politik mutlak tidak ia dapatkan. Seperti keterangan yang disampaikan oleh seorang informan :

*“seorang ajjoareng (Panutan) harus menjaga joa’nya,dalam artian menjaga hubungan emosional,komunikasi yang baik dan menjadi orang yang dapat diandalkan dilingkungannya”<sup>35</sup>*



Dari penjelasan diatas, maka implemantasi *ajjoareng-joa'* dalam kehidupan masyarakat Bone mengindikasikan bahwa hal tersebut adalah sebuah sistem nilai yang selalu ada pada setiap interaksi setiap orang baik antara individu perindividu, orang dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok lain dalam suatu masyarakat.

Pesta demokrasi melalui pemilihan secara langsung untuk menentukan legislator pada konteks suksesinya dilihat dari kalkulasi suara dukungan yang artinya setiap calon legislatif membutuhkan dukungan massa yang cukup untuk memenuhi persyaratan lolos, merebut hati pemilih serta membangun basis massa adalah hal yang diperlukan oleh sang calon. Idealnya seorang calon legislatif dipilih oleh masyarakat karena dinilai memiliki sikap dan perilaku yang peduli dan memperhatikan hubungan dengan personal masyarakat sebagai pemilih, salah satu indikatornya dengan melihat konsepsi nilai *Ajjoareng – joa'* .*Ajjoareng* yang mempunyai *joa'* (*pengikut*) paling banyak akan sukses dalam setiap momen politik khususnya pemelihan legislatif. Selain itu ada beberapa faktor yang menjadi penilaian seperti yang dikatakan oleh seorang narasumber :

“ *Mappadeceng Tau maega* (mampu mengayomi dan membantu orang banyak) *mappanre tau malupu* (memberi

---

<sup>35</sup> wawancara penulis dengan Hj.Adriani A.Page (Tanggal 24 mei 2016 pukul 15.00 2wita)

<sup>36</sup> Keterangan H.Andi Bahram Sebbu BE,S.Sos (tanggal 21 Mei 2016 pukul 22.00 wita)

makan orang lapar) *Mappainung tau madekka* (memberi minum orang haus) *Diasandrei tau maega* (dapat diandalkan orang banyak).<sup>36</sup>

*Sifat* dermawan dan kepekaan sosial yang tinggi yang terdapat pada diri seorang aktor akan sangat berguna dalam melakukan hubungan sosial atau interaksi dengan lingkungannya. Pada keseharian hubungan sosial hal tersebut memang selalu ada namun bisa pula dikatakan bahwa kadar dan bobot bantuan/perhatian seorang aktor politik akan massif ketika menjelang momen politik seperti pemilihan legislative.

Dalam momentum pemilihan umum legislatif setempat, para aktor politik, tokoh masyarakat, atau masyarakat umum itu sendiri secara personal yang memiliki pilihan politik akan mengkalkulasikan segenap modal sosial yang dimiliki dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai modal politik dalam suksesi pemilihan.<sup>37</sup> Para aktor/tokoh masyarakat akan mendatangi jaringan sosialnya dan mensosialisasikan kepentingan yang akan disampaikan dan oleh para masyarakat yang menjadi bagian dari jaringan sosial tersebut dengan segenap diri menerima pilihan

---

<sup>37</sup> Pada dasarnya, jaringan politik mengandung beberapa prinsip. Prinsip-prinsip dalam jaringan politik mencakup :

1. Jaringan politik mengandung pola hubungan-hubungan tertentu diantara pihak yang ada didalamnya.
2. Rangkaian ikatan-ikatan itu menyebabkan sekumpulan aktor politik dapat digolongkan sebagai satu kesatuan yang berbeda dengan kesatuan-kesatuan aktor politik lain dan cenderung terikat.
3. Ikatan-ikatan yang menghubungkan satu aktor politik ke para aktor politik lain itu secara relatif adalah permanen.
4. Hukum yang mengatur saling keterhubungan masing-masing aktor politik dalam jaringan itu mempunyai hak dan kewajiban yang mengatur masing-masing aktor politik.

<sup>38</sup> wawancara dengan bapak Ahmad Riadi (Pada Tanggal 22 mei 2016 pukul 13.40 wita)

politik yang dibawa tokoh tadi sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang pernah diterima olehnya atau dari keluarga sebelumnya, pola tersebut juga menunjukkan perasaan keterpenuhan kewajiban sosial seseorang kepada orang lain.

Seperti yang dikatakan oleh Ahmad Riadi :

*Karena ajjoareng – joa adalah tradisi yang masih berlaku dan dipertahankan sampai hari ini. Karena ajjoareng sangat menjaga hubungan dengan joa' nya. Baik dari segi tingkah laku maupun ekonomi .Pemimpin wajib memiliki sifat sosial yang tinggi dan tidak egois dalam memutuskan sebuah permasalahan.<sup>38</sup>*

Jaringan politik ditinjau dari sudut paradigma teori dan analisis jaringan sosial mencakup beberapa komponen yaitu para aktor politik, seperangkat ikatan politik, arus atau aliran politik, arah politik, dan pertukaran sesuatu.<sup>39</sup> Keberadaan nilai *Ajjoareng – joa'* di tengah kehidupan masyarakat yang senantiasa hadir dalam setiap hubungan atau interaksi masyarakat sangat memungkinkan menciptakan sebuah keterikatan secara emosional dan juga politik yang kemudian dari proses sosial tersebut akan menjelaskan tentang aktor politik, seperangkat ikatan politik, arus atau aliran politik, arah politik, dan pertukaran sesuatu yang kesemuanya mengidentifikasikan sebuah

---

<sup>39</sup> Para aktor politik dapat mencakup individu-individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi politik yang berperan sebagai titik-titik pemberhentian atau terminal-terminal yang biasa diwakili oleh titik-titik. Komponen seperangkat ikatan politik mencerminkan perangkat yang menghubungkan satu titik (aktor politik) ke titik lain (aktor lain) dalam jaringan. Ikatan-ikatan politik diwakili oleh garis-garis yang mencerminkan saluran atau jalur dan dapat berupa mata rantai atau rangkaian. Ikatan politik dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu ikatan politik yang dapat diobservasi dan diukur dan ikatan politik yang tidak dapat diobservasi dan diukur. Komponen arus atau jalur itu digambarkan sebagai anak panah. Suatu aliran atau jarum terdapat dari satu titik (aktor politik) ke titik lain (aktor politik lain) melalui aliran atau saluran atau jalur yang menghubungkan masing-masing titik (aktor) dalam jaringan politik tadi. Komponen keempat mencerminkan bahwa aliran itu dapat mencerminkan satu arah atau dua arah. Aliran yang mencerminkan hubungan dua arah mengandung unsur pertukaran sesuatu. Pertukaran sesuatu dapat berbentuk pertukaran informasi atau pertukaran uang, dan jenis-jenis pertukaran lain.

jaringan sosial dan politik. Di sela waktu penelitian, informan mengatakan :

*“Dalam pemilihan umum, banyak orang habis modalnya memberi tapi suaranya tidak ada, beda memang kalau orang banyak pengikutnya ikatan emosional dibangun sedemikian lama, sedemikian rupa tanpa ada embel-embel kepentingan semu segala macam justru yang lahir dari lingkungan seperti ini yang sukses meskipun tidak memberikan uang segala macam istilahnya tidak membeli suara, tidak melakukan serangan fajar karena sudah ada ikatan emosional.”<sup>40</sup>*

Hal serupa juga dikatan informan yang lain yakni :

*“Sebenarnya, dalam hal pesta politik, nilai Ajoareng – joa’ itu sangat penting artinya, maka dalam hal seperti ini artinya kalau hanya mengandalkan dana, saya kira ndak bisa berbuat apa-apa, tetapi dengan dukungan keluarga, kerabat, dan pengikut yang setia saya kira bisa kita sukses, saya terus terang saja, sebenarnya saya tidak masuk kemarin untuk menjadi calon anggota DPRD tetapi dari sekian kali saya mengunjungi dapil saya, adakan pertemuan segala macam, semua bilang majuki, ada dorongan dan terbukti dari keluarga, teman dan anggota banyak datang*

---

<sup>40</sup>Wawancara dengan A.mappanyukki takka(Tanggal 26 Mei 2016 pukul 16.30 wita)

*maka saya ini tidak terlalu gerak, artinya mereka mempunyai peranan yang besar.”<sup>41</sup>*

Pada konteks politis masyarakat khususnya di Bone yang memiliki sosok figur atau menganggapnya seorang yang dihormati akan dengan sukarela menetapkan pemberian dukungan kepadanya bahkan membantu mengasosiasikan dukungan tersebut terhadap lingkungan sosial yang dia miliki dan praktek politik berkenaan dengan hal tersebut bersifat prinsipil bagi mereka, orang akan dengan tegas menetapkan pilihan bila memang telah menganggap seorang tersebut telah jadi figur yang dihormati serta berjasa pada mereka<sup>42</sup>. Perihal demikian seperti halnya dengan pola *Ajjoareng – joa’*, ketergantungan pengikut(*Joa’*) pada pemimpin (*Ajjoareng*) karena adanya pemberian sesuatu yang dibutuhkan yang menyebabkan adanya rasa utang budi. Selanjutnya utang budi ini menyebabkan terjadinya hubungan ketergantungan atau perasaan simpatik kepada seorang tokoh dalam masyarakat. Bagi pemahaman masyarakat tradisional setempat menganggap bahwa jabatan tertentu terutama jabatan kekuasaan

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan H.Ambo Dalle, (Tanggal 27 Mei pukul 08.00 wita)

<sup>42</sup> Untuk mengenali lebih dalam tentang pola hubungan yang terjadi diantara masyarakat, termasuk untuk mengidentifikasi nilai *Ajjoareng – joa’* sebagai bentuk interaksi sosial beserta output yang dihasilkan berupa pembentukan jaringan sosial dan politik, penulis menganggap bahwa pendekatan Patron Klien juga mampu menjelaskan tentang hal tersebut. Dalam masyarakat Bone seiring pula dengan perkembangan yang terjadi sampai sekarang, simbolisasi *ajjoareng* tidak hanya berdasar atas asumsi seseorang yang berasal dari golongan tertentu semisal bangsawan tapi juga *Ajjoareng* bisa pula dipahami sebagai seorang yang mampu tampil mempengaruhi masyarakat dengan segala macam kelebihan atau kemampuan sosial yang dimiliki begitupun dengan *joa’* yang juga dalam perkembangannya baik zaman dan subkultural simbolisasi *joa’* tidak hanya berdasar atas asumsi bahwa seseorang berasal dari kalangan tertentu melainkan seluruh kalangan masyarakat bisa menjadi *joa* kepada seorang tokoh atau elit yang dijadikan *ajjoareng* yang mampu mempengaruhi dan mengikat mereka. Pola *ajjoareng-joa* kadang pula bisa dipahami sebagai suatu pola hubungan timbal balik atas pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dengan spesifikasi tertentu, seorang tokoh atau figur di daerah bersangkutan akan merasa punya tanggung jawab atas posisi sosial atau penghargaan yang diberikan kepada masyarakat kepadanya dan tetap berupaya menjaga hal itu.

adalah posisi yang sangat istimewa dalam kehidupan sosial, karena itu posisi tersebut tidak serta merta diisi oleh sembarang orang melainkan spesifikasi pengisi jabatan kekuasaan itu mesti diisi oleh kalangan tertentu. Seorang tokoh/aktor politik dengan latar belakang keluarga yang besar dalam kehidupan masyarakatnya akan dengan mudah mendapat predikat penerima dukungan dalam konteks politik pemilihan legislatif. Secara teoritis pada pendekatan *paternalistik* termasuk dalam usaha menjelaskan peran nilai *Ajjoareng – joa'* sebagai bentuk interaksi sosial masyarakat dan keberadaannya dalam mempengaruhi konstelasi politik lokal khususnya dalam pemilihan legislatif Bone, *joa'* (pengikut) dapat menjadi kepentingan *politik Ajjoareng*(panutan), bahkan bersedia menjadi simpatisan atau bisa disebut tim pemenangan atau tim sukses kandidat kontestan pemilu. Dalam masa penulis melakukan penelitian, seorang tokoh masyarakat mengatakan :

*“Ajjoareng – joa adalah hubungan yang melekat secara turun temurun oleh pemimpin dan yang dipimpin Hubungan ini terjadi secara alami dan sadar jadi setiap keputusan politik warga akan diserahkan oleh panutan.kehendak pemimpin adalah mutlak adanya dengan pertimbangan yang sesuai dengan kondisi dan keadaan warga sekitar.”<sup>43</sup>*

Terkadang pula ditemukan fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dalam momentum pemilihan umum, keberadaan tokoh-tokoh yang memiliki kekuatan sosial yang erat dengan masyarakat umum dan dianggap sebagai pola *Ajjoareng* yang mampu mempengaruhi

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ahmad Riadi (Tanggal 22 Mei 2016 pukul 14.20 wita)

kecenderungan seseorang secara personal dan massa menjadi objek yang akan digandeng oleh para kontestan pemilu untuk mendapat dukungan politik atau dijadikan sebagai tim suksesi/pemenangan pemilu. Selain interaksi sosial yang dilakukan di lingkungan dekat mereka seperti lingkaran keluarga dan kerabat sebagai pembentuk jaringan sosial dan politik, para aktor politik atau calon legislatif akan cenderung mempertimbangkan membangun pola hubungan dekat dengan masyarakat terlebih pada mereka yang mendapat predikat sosial kuat di lingkungannya sebagai seorang tokoh masyarakat.

Dalam proses politik entah di Bone maupun di daerah lain, proses tawar menawar kepentingan, alokasi dan distribusi kekuasaan itu adalah kenampakan yang nyata dalam hal tersebut, dalam politik selalu ada sesuatu yang lahir secara organis bahwa ketika telah terjadi kesepakatan ataupun kontrak-kontrak tertentu perihal tersebut akan terimplementasikan dalam konstelasi politik lokal. Kontrak politik antara elit/aktor politik dengan warga secara personal, masyarakat, komunitas, organisasi dan lain sebagainya akan teramu dalam proses perpolitikan setempat dan adalah hal lumrah bila ada faksi-faksi tersendiri antara yang berkoalisi dan yang oposisi, yang bekerjasama secara politis semenjak proses pemilihan sampai suksesi kontestasi pemilu akan merealisasikan perwujudan kepentingan bersama mereka, begitupun dengan faksi lain. Bahkan terkadang praktek penyelewengan kekuasaan sangat

memungkinkan terjadi karena naluriah dalam lingkaran hubungan emosional mereka akan lebih didahulukan karena telah terbangun sedari awal.

Dari beberapa penjelasan diatas, eksistensi nilai *Ajjoareng – joa'* dalam pengimplementasiannya sangat memengaruhi sistem kehidupan sosial masyarakat, dan juga dari masa penelitian penulis mendapatkan adanya peran dan pengaruhnya dengan kehidupan politik setempat dari dulu hingga sekarang khususnya jika diperhadapkan pada momentum pemilu legislatif. Pembentukan jaringan sosial dan jaringan politik pada beberapa tahapan mendasarnya sedikit banyak dipengaruhi oleh nilai yang ada sebagai komponen dalam proses interaksi sosial masyarakat Bone dan nilai tersebut bagi penulis yakni implementasi dari praktek *Ajjoareng – joa'* yang menjadi unsur pembentuk kepribadian masyarakat Bone secara umum, menuntutnya bertindak secara responsif ketika dihadapkan pada sebuah peristiwa termasuk momen pesta politik pemilihan legislatif untuk menetapkan pilihan politiknya dan mempengaruhi output politik lainnya.

#### **B. Pengaruh Nilai *Ajjoareng – joa'* Menjelang Pemilihan Legislatif**

Dijelaskan sebelumnya bahwa nilai *Ajjoareng – joa'* telah menjadi pemantik sebuah warna kehidupan sosial suatu masyarakat, nilai itu ada dalam wujud kepribadian masyarakat khususnya masyarakat Bone dalam menentukan sikap politik, gambaran



lingkungan sosial adalah salah satunya dengan melihat karakter secara umum masyarakat di lingkungan tersebut..Salah satu sikap peradaban orang Bone adalah bagi mereka yang amat peka terhadap apa yang mereka rasakan sebagai martabat pribadi, martabat kaum dan martabat kekerabatan yang melahirkan solidaritas emosional.

Setiap kelompok masyarakat di berbagai daerah memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan masyarakat lain, secara stereotype masyarakat Bone dikenal sebagai sebuah etnis yang menjunjung tinggi nilai persatuan, saling menghormati satu sama lain serta saling bahu membahu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara bersama, bentuk tersebut tertuang dalam Falsafah hidup masyarakat setempat yakni *Mali Siparappe,Rebba Sipatokkong,Mallilu Sipakainge* yang bisa disaksikan dalam keseharian masyarakat setempat mulai dari kegiatan sosial sehari-hari seperti silaturahmi, norma dalam melakukan hubungan sosial, pelaksanaan kegiatan/pesta, dan keadaan dimana seseorang membutuhkan pertolongan orang banyak yang kemudian waktu juga akan melakukan hal sama.

Tidak dapat dinafikan perilaku memilih dalam pemilihan legislatif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Lingkungan menjadi sebuah variabel stimulus yang dapat melahirkan respons individu. Pada dasarnya, lingkungan dapat membentuk struktur kognisi dan afeksi politik mereka

yang pada akhirnya di respons dalam bentuk tindakan. Oleh karenanya, dengan memahami karakteristik lingkungan sosial dimana individu berinteraksi, maka dapat pula memahami kecenderungan respons politik yang akan diberikan seseorang sehingga mampu mengenali perilaku politik masyarakat setempat dan menggambarkan perihal konstelasi politik lokal. Karakteristik lingkungan sosial masyarakat Bone yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sangat mengutamakan nilai hubungan sosial yang secara emosional dan kekerabatan kuat akan sangat memungkinkan melihat kemana kecenderungan pemberian dan kepercayaan politik itu akan diberikan serta output politiknya.

Preferensi dan rasionalisasi politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek sistem kepribadian dan lingkungan sosial orang itu berada. Dalam pengimplementasian serta pengaruh nilai *Ajjoareng – joa'* pada hubungan sosial masyarakat Bone menunjukkan posisi yang cukup signifikan serta terinternalisasi pada konstelasi politik lokal terutama dalam konteks pemilihan legislatif setempat. Orang cenderung memberikan dukungan politik terhadap aktor calon legislatif yang secara umum mendapat dukungan banyak di lingkungan masyarakat terlebih bila seorang masyarakat tadi memiliki hubungan interaksi dan emosional kuat dengan sang calon karena memungkinkan kepentingannya juga akan terakomodasi sesuai seperti saat berhubungan dengan sang calon dalam kondisi sosial

sebelumnya, seorang calon sangat memungkinkan memperoleh suksesi apabila telah mendapat penilaian baik dan empati masyarakat sekitarnya yang pada satu sisi pula sang masyarakat tadi baik ia keluarga, kerabat, atau di lingkungan sekitarnya merasa memiliki beban moral untuk membalas dan membantu sang calon dalam pemilihan yang telah memberikan sesuatu bentuk dalam konsepsi implementasi nilai *Ajjoareng – joa'* pada waktu sebelumnya. Pada saat sebelum masyarakat diperhadapkan dengan momentum pemilihan, sang aktor sudah memperlihatkan sikap dan perilaku yang telah mengambil simpati orang banyak akan menyamakannya dengan situasi dimana masyarakat diperhadapkan pada kondisi aktor tadi atau sang calon legislatif mengikuti kontestasi dan diharapkan mampu meraih suksesi kekuasaan. Seorang masyarakat mengatakan :

*“Memang ada figur karena dicintai dan disenangi masyarakat/kelompok masyarakat yang tanpa memobilisasi massa bahkan tanpa diketahui caleg itu sendiri, dia bekerja (tim sukses).”<sup>44</sup>*

Dalam setiap bentuk tindakan orang akan dinilai oleh masyarakat disekitarannya. Oleh masyarakat akan cenderung mempersepsikan peristiwa dalam hal ini hubungan sosial yang ada di lingkungannya dengan ikatan-ikatan nilai yang ada. Untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas harus

---

<sup>44</sup>Hasil wawancara dengan A.Baso Samad (Tanggal 1 Juni 2016 pukul 16.40 wita)

melalui proses menimbang sesuai predisposisi masyarakat. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh nilai dan norma yang dianut masyarakat, secara kultural pembentukan simbol-simbol kepercayaan masyarakat kepada suatu tatanan dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang mampu memenuhi kebutuhan sosial mereka. Penghargaan atau kepercayaan masyarakat terhadap lahirnya sosok-sosok figur di tengah masyarakat yang begitu besar pengaruhnya dalam bentuk hubungan sosial seperti penghormatan tinggi kepada para bangsawan, tokoh masyarakat, pemuka adat dan lain-lain muncul karena adanya jejak rekam mereka dalam kehidupan sosial yang dinilai patut untuk masyarakat memberikan penghargaan dan penghormatan tinggi kepada seorang tokoh dan dalam perkembangan kompleksitas zaman, hal tersebut masih tetap ada di tengah-tengahnya.

. Nilai merupakan kepribadian dan kebiasaan sehingga ketika seseorang melakukannya kadang tidak melalui proses berpikir atau pertimbangan lagi/reaktif. Biasanya nilai ini telah tersosialisasi sejak seseorang masih kecil. Umumnya bila nilai ini tidak dilakukan, ia akan merasa malu, bahkan merasa sangat bersalah bila mengambil suatu sikap dan perilaku diluar daripada nilai itu sama halnya pula dalam peristiwa pemilihan umum karena di daerah Bone sekalipun proses pemilihan langsung dilakukan secara rahasia/tertutup akan diketahui juga bahwa siapa-siapa saja yang pilih siapa dan itu berkaitan dengan hubungan sosial yang ada. Orang akan lebih memilih untuk tidak

memutus hubungan yang sudah terjalin kuat dan sudah lama dengan memilih calon legislatif yang dekat secara emosional dan kekerabatan sama agar pola timbal balik dalam hubungan sosial tetap terjaga.

Posisi atau jabatan politik adalah sebuah posisi yang dinilai istimewa dan patutnya diduduki oleh orang atau figur yang secara geopolitik sedari dulu punya rekam jejak keluarga besar dan terpendang yang mengisi jabatan kekuasaan karena dianggap pula punya tanggung jawab moral akan sebuah pemberian penghormatan dari masyarakat, mengingat bagi seorang tokoh atau calon legislatif di Bone merupakan sebagian besarnya adalah seorang yang punya predikat sosial baik di masing-masing daerahnya dan senantiasa memunculkan kepekaan sosial tinggi kepada lingkungan sosialnya dengan implementasi tindakan membantu, menolong dan peduli. Seorang atau sekelompok pengikut dan simpatisan akan sepenuh hati menyukseskan calon dalam pemilihan yang notabene adalah figur yang menjadi tokoh yang dihormatinya, dalam hal ini sang masyarakat seperti memiliki tanggungan moral pula karena mendapatkan jasa atau kepedulian sosial oleh sang calon di waktu sebelum-sebelumnya. Tidak hanya itu para keluarga, kerabat dan lingkaran lingkungan sosial sang calon juga menjadi lumbung suara ketika telah dibangun pola hubungan sosial yang menimbulkan empati dan rasa ingin membalas jasa ke berbagai bentuk implementasinya termasuk hak suara/hak pilihnya kepada sang calon.

Memang dalam konteks kultural masyarakat Bone, interaksi atau hubungan sosial yang berlangsung melahirkan suatu kesepakatan untuk adanya suatu imbalan yang bisa saja dalam bentuk memilih calon untuk lebih memperkuat hubungan silaturahmi diantara mereka sampai kemudian waktu, saling membantu, saling memperhatikan, saling menguatkan, saling memperkuat bangunan hubungan yang bagi mereka adalah posisi sosial yang seimbang bila terus mempertahankan kebiasaan itu tidak hanya sekedar karena keinginan atau kepentingan yang sifatnya sementara dan instan namun lebih merujuk kepada tanggung jawab diri atau kesadaran memiliki tanggung jawab moral sebagai bagian dari kehidupan sosial. Seorang tokoh masyarakat Bone mengatakan :

*“Saya sebagai ketua dewan pimpinan cabang sekaligus mantan anggota Dewan di partai GOLKAR(golongan karya) saya merintis sekolah bagi siswa tidak lanjut, anak-anak yang buta huruf, banyak dari mereka tidak lanjut sekolah karena alasan kendaraan atau akses yang sulit dan karena bekerja sebagai petani, sekolah itu SMP 3 di daerah gunung, tenaga pendidiknya dari guru SMP lain yang masih honorer dan beberapa guru SD. ini juga berkat kedekatan saya dengan penentu kebijakan dan dari kerabat-kerabat yang hubungan silaturahmiya terjalin dengan erat. Selain*

*itu saya juga berusaha memaksimalkan tenaga guru honorer agar menjadi lebih terjamin posisinya.”<sup>45</sup>*

Dalam hal politis, perihal tersebut mampu digolongkan dalam klasifikasi modal sosial tertentu dan modal sosial sangat erat kaitannya dengan pembentukan modal politik dalam sebuah konstelasi politik lokal khususnya pada peristiwa pemilihan legislatif.

Modal sosial yang kuat banyak membantu kerja-kerja politik dalam mengangkat isu hak masyarakat. Berbagai kerja politik dilakukan oleh masyarakat lokal untuk mendukung kegiatan-kegiatan politik seperti mobilisasi suara pemilih, partisipasi langsung dalam proses legislasi, protes/demonstrasi, lobi, serta membangun wacana sebagai modal politik untuk membangun demokrasi. Sedangkan modal politik merupakan aktivitas warga negara untuk mencapai kekuasaan dan demokrasi. Proses politik dalam hal ini adalah sebuah kontestasi politik lokal berupa pemilihan legislatif yang dilakukan melalui pemilihan secara langsung, seorang aktor politik setidaknya membutuhkan sebuah sumber daya yakni sumber daya politik. Sumber daya politik tersebut merupakan stimulus suksesi pemilihan bagi seorang aktor karena pada sisi lain proses demokrasi yang terjadi sampai saat ini

---

<sup>45</sup>Wawancara dengan A. Hamka, MM (Tanggal 1 Juni 2016 pukul 10.30 wita)

sarat akan kompetisi atau pertarungan politik memperebutkan kekuasaan.

Modal sosial memusatkan perhatian pada fungsi-fungsi aspek tertentu dari struktur sosial. Fungsi yang diidentifikasi oleh konsep modal sosial adalah nilai dari aspek-aspek struktur sosial ini bagi aktor-aktor sebagai sumber daya yang mereka gunakan untuk mencapai kepentingan mereka termasuk dalam momentum pemilihan legislatif guna mendapatkan dukungan yang massif. Realitas modal sosial dalam struktur sosial ditentukan oleh kewajiban, pengharapan dan kepercayaan yang akhirnya dinamika ini dengan mudah dapat didefinisikan sebagai sistem resiprositas umum dimana tindakan kepada seseorang akan menuai respons yang setara dari individu yang menerima tindakan itu. Dalam situasi ini, kepercayaan pada individu yang ditolong menciptakan pengharapan bahwa individu tersebut akan membalas dengan cara yang setara. Bagi individu yang ditolong, ia akan merasa memiliki kewajiban untuk membalas kebaikan itu. Dengan cara inilah modal sosial diciptakan dan dikembangkan. Pengimplementasian nilai *Ajjoareng-joa'* bagi masyarakat Bone yang memperlihatkan pola yang sedemikian mengisyaratkan adanya pengaruh yang dimiliki bila konsep tersebut diarahkan pada proses pemberian dukungan dan sangat signifikan pengaruhnya.



Banyak hal yang bisa menguatkan hal tersebut dengan melihat beberapa peristiwa pemilihan yang telah terjadi sebelum-sebelumnya. Seorang tokoh/calon dalam pemilu yang dinilai baik dan punya latar genealogi terpandang di tengah masyarakat akan mendapat dukungan dan kepercayaan politik dari masyarakat hal itupun bisa dilihat dari tokoh-tokoh setempat yang menjadi kepala pemerintahan dari struktur pemerintahan desa, kepada kelurahan, kepala kecamatan, anggota legislatif setempat bahkan Bupati, sebagian besarnya merupakan sosok yang mendapat tempat yang baik di mata dan penilaian masyarakat. Seorang informan mengatakan :

*“Ada caleg dari Amali, Hj. Adriani A. Page, SE namanya, saya minggu lalu dari Desa Tabbae .Disamping Peran dan jasa – jasa orang Tuanya dulu sehingga orang masih mengingatnya sampai sekarang ditambah perjuangan dan dia mati-matian membangun desa itu, membangun sekolah, puskesmas di desa terpencil, sarana transportasi, pasar akhirnya semua masyarakat sana mendukungnya dan Di desa itu tidak ada dana kampanye dikeluarkan beliau,. Waktu saya kesana, kata masyarakatnya kalau untuk kecamatan Amali tidak ada bisa masuk calon lain selain Ibu haji, masyarakat disana menilai beliau itu tidak sombong, kalau datang dia itu memang bekerja meski dia anggota DPRD Bone,*

*kalau ada kegiatan beliau lebih duluan datang ke tempat untuk membantu”<sup>46</sup>*

Seorang individu dapat memiliki simpanan modal sosial yang dapat dimanfaatkannya untuk mendapatkan hasil dari suatu situasi. Kepercayaan adalah dasar dari dinamika modal sosial. Tanpa kepercayaan, modal sosial mustahil diproduksi. Kepercayaan harus didapatkan, akan tetapi kepercayaan juga harus dipegang, sama halnya dengan pola hubungan *Ajjoareng-joa'* yang menjadi bentuk interaksi sosial masyarakat Bone, yang akan bertahan karena adanya hubungan yang kuat dan berkelanjutan namun sewaktu-waktu bisa saja menjadi hilang karena beberapa gejala sosial yang ada dalam hubungan masyarakat yang terlibat dalam interaksi sosial, banyak peristiwa politik di bulukumba yang terjadi untuk melihat hilangnya kepercayaan dan dukungan politik masyarakat padahal sebelumnya masyarakat memberi dukungan dan kepercayaan pada salah seorang tokoh politik seperti misalnya gagalnya seorang *incumbent* untuk menempati kembali kursi kekuasaan karena fondasi hubungan dan daya rekat yang ada dalam proses interaksi sosial kepada masyarakat baik itu dalam ranah keluarga, kerabatnya dan lingkaran lingkungan sosialnya menjadi berkurang dan dinilai tidak sesuai dengan apa yang diharapkan bekas simpatisannya tersebut yang kemudian lebih

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan A.Burhanuddin (Tanggal 25 mei pukul 09.10 wita)

memilih untuk memberikan preferensi dan respon politik kepada tokoh lain yang dianggap lebih memungkinkan akan memenuhi kebutuhan sosial masyarakat tersebut.

Dalam konteks politik, nilai *Ajjoareng- joa'* yang menjadi kepribadian masyarakat merupakan nilai yang mengikat mereka termasuk dalam situasi ketika diperhadapkan pada pemilihan legislatif setempat. Nilai tersebut terkadang menjadi nilai jual dalam mensosialisasikan jaringan politik di tengah kehidupan sosial masyarakat. Beberapa informan ada yang mengatakan bahwa dengan modal sosial diluar daripada modal capital akan mendorong orang pada pemilihan umum untuk menentukan pilihan dan dukungan. Salah seorang politisi setempat berkata :

*“Kembali pada pemahaman seseorang, ataukah menyatukan antara hubungan yang baik ini masuk ke wilayah hubungan kepentingan, itu tergantung. Dalam hal hubungan yang baik itu jangan dibawa untuk memaksakan kepentingan, tetapi untuk hal yang baik lantas orang mau membalas untuk kepentingan saya pikir tidak ada masalah, tidak ada masalah tergantung nawaitunya. Cara pandang kita melihat bahwa orang ini pernah membantu saya, pada saat tertentu ia menginginkan atau ada keinginannya untuk masuk di wilayah pilihan, wellcome saja. Saya pikir tidak ada salahnya.”<sup>47</sup>*

---

<sup>47</sup>Wawancara dengan A.Burhanuddin (Tanggal 25 mei pukul 09.30 wita)

*Ajjoareng- joa'* merupakan pilihan perilaku orang dalam statusnya sebagai masyarakat, keluarga, kerabat dan relasi, secara implikatif nilai tersebut adalah modal sosial yang dimiliki bersama sesuai dengan aras terciptanya suasana saling mengisi tersebut. Dengan melihat nilai *Ajjoareng- joa'* dari proses, posisi, implementasinya dan output yang dihasilkan akan mampu menjelaskan tentang modal sosial yang menjadi sumber daya politik dan juga tentang latar belakang terciptanya modal simbolik, genealogi atau kuatnya pengaruh patrimonial pada masyarakat tradisional yang selanjutnya pula jika ditelisik peran nilai *Ajjoareng- joa'* di tengah kehidupan masyarakat beserta dinamika hubungan masyarakat sesuai perkembangan zaman dan situasi saat ini adalah sangat memungkinkan pula melihat bentuk modal capital yang kadang menjadi alat pemenuhan kebutuhan masyarakat modern. Namun secara garis besar nilai tersebut lebih dominan mengarah pada aspek modal sosial

Namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan segala suatu dalam kehidupan sosial itu selalu ada, meskipun secara hakiki dalam masyarakat tertanam sebuah nilai yang luhur. Dalam proses politik juga mengisyaratkan sebuah dinamika di dalamnya, dinamika tersebut adalah banyak sebab yang melatar belakangnya, yang secara pasti akan mempengaruhi keseluruhan praktek politik setempat dari situasi pemerintahan, konstelasi

politik dan alur peristiwa politik tersebut. Pesta politik dalam hal ini pemilihan umum yang dilakukan secara langsung mengindikasikan peta-peta konflik dan mereduksi hubungan sosial yang ada dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam sistem demokrasi yang masih bisa dikatakan kurang dipahami oleh seluruh kalangan karena masih kurangnya pendidikan politik, dalam hal itu pula sering muncul juga permasalahan yang harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Momen pemilihan langsung sarat akan sebuah kompetisi, para aktor politik melakukan segala macam upaya untuk membentuk jaringan sosial dan politik guna suksesi di pertarungan tersebut termasuk menggunakan pendekatan nilai *Ajjoareng-joa'* dalam hubungan sosial masyarakat agar memungkinkan mengambil hati pemilih. Dalam proses tersebut melahirkan pula faksi-faksi komunitas yang cenderung mengkotak-kotakkan mereka sesuai dengan pilihan politik yang diambil, kesepakatan dalam proses suksesi sampai pada ranah telah memperoleh kekuasaan adalah kontrak kepentingan bagi yang bersangkutan yang pada saat ini lumrah terjadi serta pola timbal balik itu hanya bekerja dalam komunitas mereka sendiri dan cenderung tidak kepada yang lain, terlebih jika dianggap bukan bagian dari mereka karena pilihan dan dukungan politik yang berbeda.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Implementasi nilai *Ajjoareng-joa'* dalam kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Bone memberikan gambaran tentang interaksi sosial masyarakat yang luhur dan mengakar pada hampir setiap diri individu dan kelompok masyarakat setempat. Interaksi sosial tersebut berimplikasi pula dalam proses terciptanya interaksi politik utamanya pada momentum pemilihan legislatif bulan april pada Tahun2014, adanya budaya simpul keluhuran dalam berkehidupan yakni "*malilu sipakange,mali siparappe,rebba sipatokkong*" dan nilai falsafah lainnya yang menguatkan eksistensi *Ajjoareng-joa* mendorong perilaku masyarakat untuk saling tolong menolong serta saling menguatkan dalam hubungan sosial keseharian, saling memperhatikan sesama. Adanya keterikatan emosional diantara pihak tersebut yang juga didalamnya terjalin hubungan resiprositas yakni pola hubungan timbal balik mengindikasikan sebuah pertukaran sosial dalam hubungan setiap masyarakat, seorang individu akan memilih untuk tidak memutus hubungan kekerabatan emosional yang telah terbangun dengan seorang pihak lainnya karena merasa memiliki pertalian erat yang hendak dibayarnya dengan berbagai kompensasi atas bentuk pemberian kepedulian kepadanya termasuk pemberian dukungan dan

kepercayaan politik apabila diperhadapkan pada situasi dan kondisi politis. Perihal tersebut semakin nampak pula ketika individu atau masyarakat menghadapi sebuah peristiwa terlebih dalam peristiwa politik semisal pemilihan umum legislatif, para aktor atau calon akan mempertimbangkan konsepsi nilai *Ajjoareng-joa* tersebut dalam setiap hubungan sosialnya di tengah kehidupan masyarakat sebagai upaya membentuk jaringan politik serta mengalkulasikan dukungan pada proses suksesi pemilihan.

Praktek nilai *Ajjoareng-joa* juga merupakan variabel stimulus dalam predisposisi suatu lingkungan masyarakat setempat yang menjadi kecenderungan masyarakat dalam merespon situasi atau peristiwa politik sedang dihadapinya. Momentum pemilu legislatif adalah salah satu situasi politis yang dihadapi masyarakat dimana menjadi sebuah kondisi dalam penentuan pilihan akan diberikan kemana, pola hubungan timbal balik sebagai implikasi hubungan *Ajjoareng-joa* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya akan memberikan tafsiran tersendiri sesuai dengan hal tersebut bahwa perilaku politik pada masyarakat Bone secara umum menjadikan pola nilai tersebut sebagai suatu perihal mendasar.

Konsep nilai *Ajjoareng-joa* merupakan alur untuk mengenali konstelasi politik setempat, mulai dari simpanan modal sosial seorang aktor/calon dan individu dalam masyarakat yang memiliki peran dan pengaruh signifikan terhadap proses politik lokal sampai pada

gambaran menyeluruh tentang perilaku politik yang ada. Namun tak dapat disangkal pula bahwa dalam kehidupan politik, selanjutnya sangat mempengaruhi lingkungan sosial masyarakat jadi seperti ada pola saling mempengaruhinya, sub budaya yang ada pun terkadang jadi ekses untuk memantapkan keterikatan dalam hubungan politik dan hal tersebut berjalan secara sistematis dan berkesinambungan, misalnya terbentuknya kontrak politik yang hanya terjalin diantara pihak yang secara hubungan emosional dan kekerabatan terjalin serta kecenderungan membentuk faksi-faksi tersendiri berdasarkan persamaan dukungan dan preferensi. *Ajjoareng-joa* disini harusnya menjadi kesolidaritasan bersama dalam membangun kehidupan politik untuk tujuan kebaikan bersama seluruh masyarakat, saling mengontrol dalam pemerintahan dan sebagainya agar tercipta proses politik dalam memenuhi kepentingan masyarakat secara luas dan menyeluruh sebagai bagian dari konstelasi politik yang sehat dan ideal.

## **B. Saran**

Dari berbagai penjelasan tentang nilai *Ajjoareng-joa* beserta pola hubungannya yang dianggap membentuk kehidupan sosial masyarakat setempat, sehingga dapat dikatakan bahwa betapa besar peran dan pengaruhnya terhadap aspek sosial juga dalam proses politik khususnya dalam momentum pemilihan umum legislatif. Jadi menurut paham penulis nilai *Ajjoareng-joa* harusnya dijadikan instrumen yang menghilangkan arogansi perbedaan



kepentingan dalam sebuah kontestasi politik terlebih lagi pada konflik-konflik yang sering terjadi. Dalam proses politik, hal itu menjadi sangat penting dalam menciptakan konstelasi politik sehat dan ideal utamanya terhadap pendewasaan demokrasi kita.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar. 1999. Hlm. 97. **Politik Indonesia**. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 2007. **Patron & Klien Di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Fungsional-Struktural**. Yogyakarta: Kepel Press.
- Ahmad Fhatoni. 2015. **Budaya Politik Di Indonesia : Perkembangan & Ciri-Ciri**.<http://Www.Zonasiswa.Com/2014/11/Budaya-Politik-Di-Indonesia.Html>
- Ali Murtopo. 1981. Hlm. 179. **Strategi Pembangunan Nasional, Csis, Dalam Bintang R. Saragih, Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia**, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Almond, Gabriel Dan G Bingham Powell Jr. 1966. **Comparative Politics: A Development Approach**. Boston: Little Brown.
- Almond Dan Verba. 1990. **Budaya Politik, Tingkah Laku Politik Dan Demokrasi Di Lima Negara**. Bumi Aksara : Jakarta.
- Amich Alhumami. **Politik Kekerabatan**. Dari [Www.Kompas.Co.Id](http://Www.Kompas.Co.Id) "Hoakiau Berpolitik: Dari Trauma Ke Trauma" Dari [Www.Majalahtempointeraktif.Com](http://Www.Majalahtempointeraktif.Com)
- Anderson, Benedict R. O'g. 2000 **Kuasa Kata : Jelajah Budaya – Budaya Politik Di Indonesia**. Yogyakarta : Mata Bangsa.
- Arny Gutmann. 1977. **Children, Paternalism And Education” Dalam Philosophy And Publik Affairs**. 9 (Musim Panas 1980), Hlm. 338-358 Dan Francis Schrag. *The Child In The Moral Order* “ Dalam *Philosophy*, 2 (April 1977), Hlm. 167-177
- Budiardjo, Miriam. 2005. **Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Dr.H.Rusadi Kantaprawira,Sh., 1988. **Sistem Politik Indonesia**. Cetakan Kelima (Cetakan Pertama 1977), Cv. Sinar Baru, Bandung,.
- Eko Nugroho. 2008. **Sistem Informasi Manajemen: Konsep, Aplikasi, Dan Perkembangan**. Andi. Yogyakarta.
- Frucot, Dan Shearon Winston T. 1991. **.Budgetary Participation Locus Of Control And Mexican Managerial Performance And Job Satisfaction..** The Accountingreview, January: 80 . 89.

Gaffar, Afan. 1992. ***Javanese Voters. A Case Study Of Election Under A Hegemonic Party System***. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Hay, Colin. 2007. ***Why We Hate Politics***.

Hasil Munas Viii Partai Golkar Tahun 2009 “**Suara Rakyat Suara Golkar**” Hal. 82. Sekretariat Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Tahun 2009.

Huberman, A. Michael Dan Matthew B. Miles. 1992 . **Analisis Data Kualitatif**. Jakarta : Uii Press.

Hood, R. And Koberg, C.S. 1991. ***Organizational Culture Relationship With Creativity And Other Job Related Variables***. Journal Of Business Research. 15 (3):397-406.

Imam Mujahidin Fahmid. 2012. **Identitas Dalam Kekuasaan**. Makassar: Innawa, Hlm. 25

Inu Kencana. (1998). **Manajemen Pemerintahan**. Jakarta : Pt. Pertja.

Jati, W. Raharjo. 2012. **Kultur Birokrasi Partrimonialisme**. Jurnal Borneo Administrator. Volume 8 No. 2. [Www.Academia.Edu/1887608/Kultur Birokrasi Ptrimonialisme D  
alam Pemerintah Provinsi Daerah Yogyakarta](http://Www.Academia.Edu/1887608/Kultur_Birokrasi_Ptrimonialisme_Dalam_Pemerintah_Provinsi_Daerah_Yogyakarta) (Diakses Tanggal 17 Maret, 2016)

Kooreman, P.J. 1883. ***De Feitelijke Toestand In Het Gouvernementsgebied Van Celebes En Onderhoorigheden***. Indische Gids 5 (1883:189)

Max Weber. 1985. **Konsep-Konsep Dasar Dalam Sosiologi**. Jakarta. Cv Rajawali.

Mustika, Reni. 1999. **Pengaruh Locusof Control Dan Budaya Paternalistik Terhadap Keefektifan Penganggaran Dalam Peningkatan Kinerja Manajerial**. Jurnal Bisnis Dan Akutansi, Vol 1 No.2 Hal 93-115.

Pelras, Christian. 1981. **Manusia Bugis**, Halaman 11;1981.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Poerwati, Tjahjaning, (2002). **Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial: Budaya Organisasi Dan Motivasi Sebagai Variabel Moderating**. Simposium Nasional Akuntansi 5 Semarang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xi/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Rahman H.I. 2007. **Sistem Politik Indonesia**. Graha Ilmu, Jakarta.

Silalahi, Ulber. 2009. **Metode Penelitian Sosial**. Bandung. Pt. Refika Aditama.

Supriyono, R.A Dan Syakhroza, Akhmad. 2004. **Peran Asimetri Informasi Danperesponan Keinginan Sosial Sebagai Variabel Moderating Hubungan Antara Partisipasi Penganggaran Dan Kinerja Manajerial Di Indonesia**. Simposium Nasional Akuntansi Vi: 955-970.

Suryadinata, Leo. 1992. **Golkar Dan Militer : Studi Tentang Budaya Politik (*Golkar And Military : A Study Of Political Culture*)**. Gramedia Press. Jakarta.

Keterangan H.Andi Bahram Sebbu BE,S.Sos (tanggal 21 Mei 2016 pukul 19.27 wita)

Keterangan H.Andi Bahram Sebbu BE,S.Sos (tanggal 21 Mei 2016 pukul 19.40 wita)

Wawancara penulis dengan A. Mursalim (Tanggal 19 Mei 2016 pukul 13.00 wita)

wawancara penulis dengan Kaharuddin (Tanggal 22 mei 2016 pukul 16.00 wita)

wawancara penulis dengan Hj.Adriani A.Page (Tanggal 24 mei 2016 pukul 15.00 2wita)

Keterangan H.Andi Bahram Sebbu BE,S.Sos (tanggal 21 Mei 2016 pukul 22.00 wita)

wawancara dengan bapak Ahmad Riadi (Pada Tanggal 22 mei 2016 pukul 13.40 wita)

Wawancara dengan A.mappanyukki takka (Tanggal 26 Mei 2016 pukul 16.30 wita)

Wawancara dengan H.Ambo Dalle, (Tanggal 27 Mei pukul 08.00 wita)

Wawancara dengan Ahmad Riadi (Tanggal 22 Mei 2016 pukul 14.20 wita)

Hasil wawancara dengan A.Baso Samad (Tanggal 1 Juni 2016 pukul 16.40 wita)

Wawancara dengan A. hamka, MM (Tanggal 1 Juni 2016 pukul 10.30 wita)

Wawancara dengan A.Burhanuddin (Tanggal 25 mei pukul 09.10 wita)

Wawancara dengan A.Burhanuddin (Tanggal 25 mei pukul 09.30 wita)